

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016**



**LASRI
2014.235.00.141**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016**

Disusun dan diajukan oleh

**LASRI
2014.235.00.141**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA BATU
KE'DE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016**

Disusun dan Diajukan Oleh

LASRI

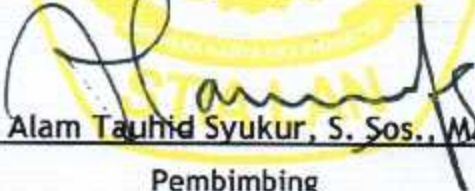
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.141

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 30 Januari 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Menyetujui,


Dr. Alam Tauhid Syukur, S. Sos., M. Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar


Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

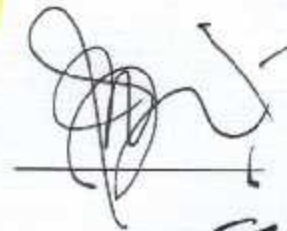
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016**

Pada hari ini, Selasa, 30 Januari 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama Lasri dengan Nomor Pokok 2014.235.00.141

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Prof. Dr. Muh Basri., M. Si



Sekretaris : Andi Rasdiyanti, SS., M. Pd



Anggota : Dr. Alam Tauhid Syukur, S. Sos., M. Si



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 30 Januari 2018.....

Yang menyatakan,



NPM. 2014. 235. 00. 41

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikumWr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat,dan karunia kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul“ **AnalisisPelaksanaan Program Pembangunan di Desa BatuKe’ de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang**”.

Dalam kurung waktu penulisan terdapat banyak hambatan, tantangan dan masalah dalam menyiapkan skripsi ini namun dapat terselesaikan.Semua tak lepas berkat dukungan dari Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur,S,Sos,M, Si , selaku pembimbing yang membantu dalam memberikan arahan dan saran-saran yang membangun serta dukungan dari orang orang terdekat, karib,kerabat dan orang orang sekitar sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini ,walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan di segala hal..

Maka ijinkan penulis terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang setinggi kepada :

1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA.,Ph.D selaku Ketua STIA – LAN Makassar yang telah memberikan ijin dan arahan yang baik sehingga penulis memperoleh ilmu yang banyak dan pendidikan yang baik selama di kampus STIA-LAN Makassar.
2. Drs. H. Muslimin Bando,M.Pd selaku Bupati Kabupaten Enrekang yang telah mendukung dan memberikan izin Belajar selama perkuliahan.
3. .Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program studi atas ijin untuk meneliti Dan saran yang diberikan makinm embuka wawasan dan pemikiran selama menulis skripsi ini.

5. Kedua orang tua, ibunda (alm).Dudu (alma). Yan gmerupakan peneyemangat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Istri (Nurhaeda S) dan anak-anak tersayang (Muh Firdaus dan Muhammad Firnaim, Nur Afirka serta Muh Fiqhi Afrisa) yang telah mendukung saya selama ini mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
7. Teman - teman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga segala bantuan, kebaikan dan kerjasama yang telah diberikan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunansk skpsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan.Oleh karena itukritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan, Akhir Kata semoga skripsi ini bermamfaat bagi semuanya

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Enrekang, 2018

Lasri

INTISARI

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016

Penulis : Lasri
Penasehat : Alam Tauhid Syukur

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program pembangunan di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan. Temuan hasil penelitian ini yaitu dari beberapa: dengan indikatornya: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sumber daya aparat pemerintah Desa belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kompetitif dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sehingga masih sangat dibutuhkan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya. Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Pada bidang Pembangunan Desa, Desa Batu Ke'de telah melakukan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di putuskan dalam musrembang, namun yang masih sangat untuk diperhatikan khususnya bagi pemerintah desa adalah pembangunan SDM, jangan hanya pembangunan fisik semata. Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, mulai dari pembinaan fasilitas LKSMD, pembinaan fasilitas PKK, pembinaan pemuda, pembinaan fasilitas hansip, sampai pembinaan kader Posyandu dilakukan dengan mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya kepada semua lembaga yang ada di Desa Batu Ke'de dapat mandiri dan berbuat serta berinovasi dalam lembaganya masing-masing untuk kemajuan Desa, Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas di dalam memanejemen pemerintahan Desa. Termasuk melakukan pelatihan sistem aplikasi keuangan desa, pelatihan kades dan aparat, pelatihan kapasitas, manajemen sistem pemerintah desa dan bentuk pelatihan KPMD dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan solusi, menganggarkan dana DD atau dana transper untuk melakukan kegiatan bidang pemberdayaan untuk mengacu ke sumber daya yang manusia yang punya kompetitif dalam menyongsong era digital atau IPTEK dalam berbagai bidang mengenai pembangunan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Pembangunan, di Desa Batu Ke'de

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT PROGRAM IN VILLAGE DESA KE'DE SUB DISTRICT MASALLE REGENCY OF ENREKANG

Author : Lasri
Supervishors : Alam Tauhid Syukur

The main problem in this research is how to implement the development program in Batu Ke'de Village, Masalle Subdistrict, Enrekang Regency and aims to know the implementation of development program in Batu Ke'de Village, Masalle District, Enrekang Regency.

In this research using qualitative research methodology through interview and observation process. The interview was conducted by direct questioning to the informant. The findings of this study are the indicators of the field of administration of village administration, the field of village development, the field of community development and the field of community empowerment.

The results of the research are in the field of Village Government Implementation, musrembang conducted in Batu Ke'de village involving representatives from the community of BPD, village government officials, religious leaders, and institutions in the village, in the field of Village Development, Batu Ke'de Village has done development in accordance with the plan that has been decided in musrembang, in the field of Community Development, starting from the guidance of LKSMD facilities, PKK facility development, youth coaching, guidance of hansip facilities, to guidance Poyandu cadres conducted by holding meetings discussing the relationship with the implementation of development, and village infrastructure for village progress, in the field of community empowerment, is done with efforts to improve the capacity and capacity in managing the village government. Including training on the village's financial application system, cadet training and apparatus, capacity training, village government system management and KPMD training forms are conducted outside the province for three days. It is suggested to the government to further improve the solution in various fields about the development that will be done so that people can know more and give more input to the government

Keywords: Implementation, Development Program, District Government.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTI SARI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Konsep Pembangunan.....	12
2. Konsep Pembangunan Desa.....	25
3. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa	36
B. Hasil Penelitian yang Relevan	49
C. Deskripsi Fokus Penelitian	52
D. Kerangka Konsep	56
E. Pertanyaan Penelitian	58
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN.....	59
A. Pendekatan Penelitian	59
B. Desain Penelitian.....	59
C. Sumber Data	61
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	61

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	61
F. Keabsahan Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian	65
B. Karakteristik Sumber Data.....	68
C. Dekripsi Data dan analisis Data	72
D. Hasil Analisi data	99
BAB V PEMBAHASAN	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 APBDesa Tahun 2016	8
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konsep	57
Gambar 2	APBD 2016	80
Gambar 3	Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor	83
Gambar 4	Pelaksanaan Musrembang	84
Gambar 5	Pembangunan Posyandu.....	86
Gambar 6	Pelaksanaan Rabat Beton Parandean Lumika.....	88
Gambar 7	Pengecoran Jln Dusun Kira.....	90
Gambar 8	Pembinaan Kader LKSMD	94
Gambar 9	Pelatihan Sistym Aplikasi Desa.....	97
Gambar 10	Pelatihan KPMD.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan peraturan Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antara instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan . Berdasarkan dengan hal tersebut dimana desa adalah merupakan bagian dari sistim pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyeleenggaraan pembangunan pun pemerintah harus pemerintah desa haru sinkron dengan peneyelenggaraan maupun pemebnagunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, propinsi mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyarawatan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan yang ada.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Todaro (2004: 103). Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk

membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Tjokroamidjojo, 2012:41).

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan upaya mencapai tujuan nasional seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan proses untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sekarang. Untuk itu pembangunan yang dilaksanakan harus merata diseluruh wilayah Indonesia baik di desa maupun di kota dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi Sumber Daya Manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai obyek dan subjek pembangunan. Dikatakan sebagai obyek pembangunan karena sebgai penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan, sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan dipedesaan maupun pembangunan nasional.

. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk

mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Dalam proses pembangunan, selain kemajuan secara fisik juga diutamakan adanya perubahan sikap mental masyarakat agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak akan tercapai apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima ide-ide baru secara aktif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa), menjadikan desa sebagai satu kesatuan antara

pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala desa dipilih oleh masyarakat desa, sehingga pemerintahan desa bersumber pada masyarakat desa. Undang-Undang Desa disambut sebagai payung hukum untuk desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis. Dalam perwujudannya dapat dilihat pemerintah bertindak selaku pembimbing dan pengayom masyarakat, sedangkan masyarakat berperan selaku agen-agen pembangunan desa yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disambut semarak, tidak terbatas oleh pemerintah desa. Undang-undang desa menjadi topik perbincangan di berbagai diskusi publik, media, maupun keseharian warga. Optimisme tumbuh meski tidak semua pihak menatap Undang-undang desa dengan pemahaman yang sama. Sebagian melihatnya sebagai tonggak dimulainya pendalaman demokrasi pada aras lokal, lainnya menganggap Undang-undang desa sebagai jalan membangun kemandirian desa dan ekonomi warga.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yakni Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa menjadi fenomena hangat untuk diperdebatkan terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa tersebut desa

diberi kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penulisan ini ada beberapa hal di pasal Undang-Undang desa yang menyoroti tentang pengawasan di Undang-Undang Desa. Pasal 78 ayat (2) misalnya menjelaskan bahwa pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pasal 112 ayat (1) menguraikan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan dijelaskan dalam Pasal 113 bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Desa sendiri, pembangunan desa dan kawasan perdesaan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang menggunakan pendekatan desa membangun. Kedua, pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, kementerian/lembaga serta melibatkan kerjasama antar pemerintah yang menggunakan pendekatan membangun desa partisipatif.

Keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan desa yang secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian, faktor-faktor lain yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan juga harus

diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah partisipasi, Sumber Daya Manusia, biaya, informasi, logistik, dan kewenangan dasar hukum.

Dengan seiringnya perkembangan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan tugas penyelenggaraan pembangunan secara langsung kepada pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Bab 1 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk masyarakat desa.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakatnya, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Di Indonesia tujuan pembangunan nasional tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang isinya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah telah dibuat dan diimplementasikan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui instansi-instansi di daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Dalam mewujudkan tujuan program Pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manjerial dalam pembangunan, Pola manjerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati mamfaatnya oleh masyarakat.Salah satu hasil yang yangdibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan . Selain itu juga diperlukan kebijakan Pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan , baik yang secara skala lokal maupun yang sifatnya sektoral atau pembangunan daerah yang masuk ke desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi sumber Daya Manusia yang memiliki peran ganda,yaitu sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan . Dikatakan sebagai obyek pembangunan karena sebagai penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan, sedangkan sebagai subyek pembangunan pedesaan memegang peranan penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembanguna dan pelaksanaan pembangunan di pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pelaksanaan program pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga, sehingga akan timbul satu program dan prakarsa dan swadaya serta gotong –royong dari masyarakat, sekaligus lahir partisipasi masyarakat secara spontan .

Tabel 1
APBDesa Batu Ke'de Tahun 2016.

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Dalam Rupiah)	Keterangan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	179 645 000	
	Penghasilan tetap dan tunjangan	114.720.000	ADD
	Operasional perkantoran	34.684.000	
	Operasional BPD	1.005.000	
	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor desa	19.100.000	
	Kegiatan Musrenbang desa dan penyusunan RKPDes dan APBDes	4.366.000	
	Kegiatan musyawarah dan penyusunan LKPJ/LPPD dan IPPD Des	790.000	
2	Bidang Pembangunan Desa	522.099.000	DD
	Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar	64.599.000	
	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	457.500.000	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27.975.000	ADD
	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi LKSMD	475.000	
	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi PKK	8.190.000	
	Kegiatan Pembinaan Pemuda	7.510.000	
	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi Hansip	4.800.000	
	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi kader posyandu	7.000.000	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	27.200.000	DD
	Pelatihan sistim aplikasi keuangan Desa (2) orang	5.100 000	
	Pelatihan Kades dan aparat Desa (3) orang	9.600 000	
	Peningkatan Kapasitas dan manajemen sistim Pemerintahan Desa	9 000 000	
	Pelatihan KPMD Pemberdayaan Tehnis (0rang)	35 000 000	
5	Pembiayaan (BUMDES)	100 000 000	DD
	TOTAL BELANJA	856 919 000	

Sumber: APBDes Desa Batu Ke'de Tahun Anggaran 2016

Dengan tabel diatas yang bersumber dari APBDesa Batu ke'de tahun anggaran 2016 menggambarkan pelaksanaan program pembangunan dengan sub fokus: diantaranya adalah Bidang penyelenggaran Pemerintahan,Bidang Pembanguna,Bidang Pembinaan dan Biudang pemberdayannya. pelaksanaanya ada yang tidak mencapai sesuai dengan target dikarenakan oleh beberapa faktor . Sala satu diantaranya adalah Pelaksanaan APBD Kabupaten yaitu Dana Alokasi Khusus sementara dalam pengerjaan sehingga pemasokan bahan material ke lokasi tersebut terisolasi.

Fenomena yang kedua terkait dengan pelaksanaan program pembangunan didesa Batu Ke'de khususnya bidang penggunaan dana desa . Penggunaan Dana Desa yang diperuntuhkan untuk pembangunan desa dalam hal pembangunan fisih lebih dominan disbanding dengan pembangunan manusianya khususnya pada bidang pembinaanmasyarakat atau lembaga desa dan pemberdayaan terhadap semua stap desa yang ada. yang hanya terfokus pada pembangunan fisik semata sementara anggaran untuk pemberdayaan khususya aparat pemerintah desa masih sangat minim,Karena keberhasilan pembangunan didesa tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia dan masyarakt yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana

pelaksanaan program pembangunan di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan penelitian dalam bidang kajian pemerintahan, khususnya dalam karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan khasanah ilmu..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dijadikan suatu bahan studi perbandingan dan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Sebagai pengembang disiplin ilmu kearah berbagai spesifikasi

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Kepala Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan sehingga dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa .
- b. Bagi pejabat Pemerintahan Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta yang berguna untuk kedepannya, dan juga dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai suatu acuan bagi pemerintah Desa atau Kelurahan dalam penetapan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan didesa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Pembangunan

Menurut Basri dan Subri (2006:38) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis.

Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Siagian (2008:39) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Menurut Siagian (2008:98),

Pembangunan itu sendiri adalah suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus me nerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai,

selanjutnya untuk memberikan ini Siagian (1994:13) memberikan defenisi yaitu bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
4. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.
6. Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.)

Selanjutnya dijelaskan oleh Tjokroamidjojo (1998:97) Bahwa :

Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju

terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian pembangunan seperti yang telah diuraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses (Placeholder2) kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Semua itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani.

Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik dikemukakan oleh Kirdi dipoyudo bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. (Tjokramidjojo. 1998;3-4)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni : harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan

pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010:45) pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Kuncoro, 2010:97) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Kuncoro, 2010:98).

Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Jakob Oetama yaitu bahwa pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan system nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. (Adisasmita, 2006:54).

Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu factor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan sebagainya.

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Pembangunan juga sebagai satu proses menuju kearah yang lebih baik. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakekat tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tjokroamidjojo (1998:19) memberikan definisi bahwa pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, social budaya, dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.

Siagian (1994:3) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

Sedangkan Mansur (2002:63) menyatakan bahwa pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu:

- 1) Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia.
- 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana.

Siagian (1994:56) mengatakan bahwa di beberapa daerah yang sedang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai tujuan yang meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat,
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja, dan
- 4) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk terlaksananya pembangunan diseluruh daerah dengan benar sesuai tujuan yang akan dicapai harus dimulai dengan perencanaan yaitu:

- 1) Mengadakan penelitian sumber-sumber yang dibutuhkan dana tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan dan tenaga-tenaga yang penting untuk sektor-sektor prioritas.
- 2) Menyusun suatu kebijakan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Menurut Usman (2003:12) bahwa pembangunan daerah seharusnya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan negara saat ini. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting yaitu:

- 1) Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar,

- 2) Aspirasi masyarakat daerah sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah,
- 3) Keterkaitan antar daerah dalam menata perekonomian dan politik.

Terdapat empat aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1998:23):

- 1) Terlibat dan ikut sertanya masyarakat sesuai mekanisme proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan dilakukan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Cohen dan Uphoff (1990:104) menguraikan tiga tahapan dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- 1) Tahap perencanaan (*idea planing stage*).
Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
- 2) Tahap pelaksanaan (*implementation stage*).
Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
- 3) Tahap pemanfaatan (*utilitazion stage*).
Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Dampak dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan menurut Abe (2002:117) adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.

- 2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan program masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

a. Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

“Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini diarahkan kepada terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spritual. Dalam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa: pembangunan Nasional itu adalah: “Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai ”.

Masyarakat yang adil dan makmur masih jauh dari jangkauan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, masih diperlukan usaha-usaha disegala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyukseskan kegiatan pembangunan selanjutnya. Uraian ini tidak bermaksud untuk menyatakan kapan masyarakat adil dan makmur itu dapat diwujudkan, karena pada dasarnya tidak seorang pun yang dapat memastikan hal itu

itu akan terjadi tetapi yang penting bahwa kegiatan pembangunan itu harus dilaksanakan secara berencana, sadar, terus menerus menuju sasaran akhir.

Peran aktif Pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan pembangunan Nasional dilakukan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan adalah arah kegiatan yang ditetapkan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan Nasional. Dengan perencanaan pembangunan yang dimaksud agar pembangunan dapat terlaksana secara berencana yaitu secara sadar, teratur, sistematis dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional yang telah dijabarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS), perlu adanya koordinasi dengan badan pengawasan pembangunan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana, transportasi dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Usaha dan hasil pembangunan Nasional

memang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Namun tidak dapat dihindari kemungkinan timbulnya dampak negatif karena proses pembangunan dan perubahan.

b. Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Menurut Sumaryadi (2000 : 98) Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- 3) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
- 4) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Tujuan pembangunan daerah itu sendiri adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sehingga pembangunan di daerah perlu ditingkatkan agar terus tampak adanya kemampuan yang nyata bagi penduduknya, dalam rangka partisipasi masyarakat dan dukungannya terhadap pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dari uraian diatas, jelas bahwa keikutsertaan masyarakat dalam keberhasilan pembangunan daerah tersebut dapat sukses apabila ditunjang dengan dana. Disamping itu aparaturnya Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah semaksimal mungkin sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, khususnya pembangunan dipedesaan.

c. Pembangunan Desa

Menurut Koentjaraningrat (2002 :16) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk didaerah pedesaan. Pembangunan pedesaan ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi masyarakat didaerah pedesaan untuk berkembang atas atas kekuatan dan kemampuan sendiri. Sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan, bimbingan, dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya yang berdasarkan atas kegotong royongan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pembangunan desa adalah upaya pembangunan yang secara langsung berorientasi pada peningkatan

taraf hidup masyarakat desa secara merata, menyeluruh dan meliputi berbagai hidup dan kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah, menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan terendah yaitu tingkat desa atau kelurahan (Kansil, 1991:193).

Adisasmita (2006:11) mengemukakan bahwa pembangunan desa adalah suatu atau rangkaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan lingkungan orang desa agar potensi sosial, ekonomi dan politik wilayah pedesaan mendukung ketahanan nasional di desa. Ndraha (1994:3) mengatakan bahwa pembangunan desa sebagai suatu proses di dalam mana masyarakat desa berkenan mengambil bagian secara aktif atau bagian perkataan lain berpartisipasi dan memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan. Sedangkan menurut Siagian (1994:17) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20), pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wojowasito, 2007:105) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut Sumaryadi (2000:47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah.

Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Kunarjo (2002 : 54). Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- 1) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- 2) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- 3) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

- 1) Pembangunan bidang keagamaan
- 2) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- 3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- 4) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
- 5) Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Dari pendapat tersebut diatas, dapat pula disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Oleh karena itu, salah satu ciri utama pembangunan desa adalah keikutsertaan seluruh masyarakat.

2. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dan masyarakat desa untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah desa.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Desa merupakan level pemerintah terendah di Indonesia dan memiliki ciri khas yang unik. Ciri khas desa yang unik ini semakin menguatkan asumsi bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting adanya penguatan peran lembaga-lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Istilah lembaga pemerintahan desa bisa mengacu tidak hanya organisasi atau badan di desa yang melakukan usaha tertentu, tetapi juga mengandung pola perilaku masyarakat desa yang mapan. Oleh sebab itu, penggunaan konsep lembaga pemerintahan desa tidak hanya menunjuk pada pemerintah desa saja, tetapi juga mencakup badan-badan desa yang lain seperti keberadaan badan permusyawaratan desa, badan sosial desa maupun badan ekonomi desa.

Adapun untuk pembangunan desa meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Ini adalah persoalan yang menyangkut sampai berapa jauh informasi yang kita miliki mengenai pembangunan, apabila kita tidak mengerti arti inti dari pembangunan itu. Menurut Todaro (1977: 103) menyatakan bahwa pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan atau kejahatan dunia sekarang. Kekurangan makanan yang sehat atau bergizi, penyakit, buta aksara,

kemundurankemunduran, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan itu mengalami kegagalan atau walaupun sukses hanyalah sebagian kecil saja.

Tiap-tiap negara mengejar pembangunan adalah suatu tujuan bahwa semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satusatunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang.

Karena itu, pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial. Sebagai tambahan, terhadap perbaikan-perbaikan di bidang penghasilan dan *out put*, khususnya diadakan perombakan-perombakan yang radikal dalam lembaga-lembaga, struktur dan administrasi, begitupun dalam sikap-sikap mental dan bahkan banyak pula harus mengubah adat kebiasaan dan kepercayaan. Akhirnya walaupun pembangunan itu biasanya ditetapkan atau diarahkan dalam konteks nasional, realisasinya yang luas bisa memaksa modifikasi fundamental ekonomi internasional, begitupun sistem sosialnya. Akan tetapi, sebelum mengadakan analisa mengenai kompleksitas pembangunan, kita mulai

dulu dengan membahas dua macam pendekatan konseptual yang penting mengenai studi atau telaah pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan meninjau kembali dua pengertian yang penting, yaitu dualisme dan masyarakat ganda.

Pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan sehingga pembangunan adalah proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. (Kartasasmita, 1995:23).

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994: 105) memberikan pengertian pembangunan adalah “usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Todaro (1977: 128) menyebutkan bahwa apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyarakat haruslah mempunyai paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan;
- 2) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan

yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, semuanya itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata-mata, tetapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional;

- 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Disamping itu diutamakan pula adalah untuk menghapus kemelaratan khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu strategi desa yang telah dikembangkan antar lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa. Pendekatan (*top down*) dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintah.

Pendekatan (*bottom up*) dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat

desa sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

b. Perencanaan

Rencana kerja Pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat (RKPDES) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah kabupaten Kota. Usulan kebutuhan pembangunan Desa tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota . Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa Jika pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota menyetujui usulan tersebut maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. RKP Desa adalah penjabaran RKPJM Desa untuk jangkah waktu satu tahun Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi , perencanaan .penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pemebangunan desa berdasarkan pasal 29 (1) dan (2) . pasal 31 ayat (2) . pasal 35 ayat (1) dan

pasal 36 ayat (1) permendagri No 114 tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan Desa bahan bahan pendukung dalam penyusunan RKP

Desa yaitu:

- 1) RPJM Desa
- 2) Hasil musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- 3) Data dan informasi dari kabupaten kota tentang :
 - a. Pagu indikatif desa yang meliputi
 - 1) Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN
 - 2) Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan dari bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten kota
 - 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota dan
 - 4) Rencana bantuan keuangan dan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan rencana anggaran belanja kabupaten kota
 - b. Rencana program/program kegiatan pemerintah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.
- 4) Keadaan dan masalah yang dihadapi antara lain: peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap, fasilitas pemerintah sering terlambat, kualitas eksekutif dan legislative terbatas, daerah kekurangan referensi, culture shock (daerah-isme), formulasi perimbangan keuangan antara daerah dengan desa tidak ada dan terjadi expenditure yang tidak rasional, inkonsistensi aturan dan kewenangan, kualitas SDM penyelenggara pemerintah desa dan kuantitas sarana serta prasarana kerja terbatas.

Dari beberapa pedoman perundang-undangan maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan) dan waktu (kapan, bagaimana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

c. Perencanaan Desa

Perencanaan desa adalah perumusan tujuan, kebijakan, dan pelayanan desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Pelayanan Desa terdiri dari struktur organisasi dan tugas pemerintah desa. Pelayan

desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Sekretris desa adalah salah satu perangkat desa yang bertugas mengurus administrasi didesa. Misalnya, membuat surat kelahiran atau surat keterangan. Pelayanan desa bertujuan untuk menyelenggarakan subsistem pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Desa dapat juga melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Sehingga didesa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan desa.

LPMD merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. LPMD mempunyai program untuk memaksimalkan perencanaan pelayanan desa.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (Nurcholis, 2011: 4) menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan

hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I Nyoman Beratha (Nurcholis, 2011: 4) memaparkan bahwa desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan ayau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dipemerintahan kabupaten/ kota.

Pelaksanaan perencanaan pelayanan desa dilakukan oleh kepala desa sekretaris desa, BPD dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah desa akan tercapai apabila saling dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat desa.

Lembaga dipahami sebagai aturan main dari suatu masyarakat untuk mengelola interaksi antar individu anggota masyarakat. Lembaga desa merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat desa dengan basis nilai tertentu yang merupakan hasil proses sosial historis masyarakat desa bersangkutan. Bentuk kelembagaan dengan sendirinya mencerminkan situasi, kondisi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat desa bersangkutan. Lembaga dapat pula diartikan sebagai organisasi dimana karakteristik lembaga akan ditentukan oleh proses pembentukan, orientasi, nilai-nilai pengikat, model keanggotaan maupun cara kerja. Menurut definisi ini, maka lembaga desa meliputi lembaga yang bersifat formal (lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa) dan lembaga non formal (lembaga yang dibuat oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi).

Lembaga-lembaga desa perlu untuk diperkuat dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan masyarakat desa dalam memberikan respon terhadap perkembangan dan persoalan-persoalan yang hadir di desa yang berarti memperkuat otonomi desa. Peran kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, saat ini semakin menguat dibandingkan era tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan

paradigma pembangunan dan pemerintahan, baik dalam lingkungan intra maupun ekstra sosial.

Melihat keterbatasan kewenangan desa, dana, sumber daya, dan kedudukan organisasional yang ambivalen antara organisasi pemerintah (desa) dengan lembaga kemasyarakatan, maka pemerintah desa perlu menerapkan strategi pengembangan peningkatan peran kelembagaan desa yang dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan (tata kepemimpinan) yakni dengan meningkatkan kepemimpinan kepala desa atau badan permusyawaratan desa, menyiapkan kematangan masyarakat desa, menjaga keharmonisan hubungan pemerintahan desa, dan memahami visi dan misi yang diemban.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (tata pemerintahan) yakni dengan meningkatkan kelembagaan dalam hal kewenangan, organisasi, personil, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengawasan, dokumentasi untuk pemerintah desa. Meningkatkan fungsi agregasi dan artikulasi, budgeting, pengawasan, serta legislasi untuk badan pemerintahan desa.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya sosial (tata kemasyarakatan), yakni dengan meningkatkan:
 - a) Sumber daya manusia: pendidikan dan kesehatan.
 - b) Sumber daya sosial politik: partisipasi politik masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, eksistensi lembaga kemasyarakatan;

- c) Sumber daya sosial ekonomi: infrastruktur ekonomi desa dan aktivitas ekonomi pedesaan;
- d) Sumber daya sosial budaya: kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat;
- e) Sumber daya sosial agama: toleransi kehidupan beragama dan sarana ibadah.

3. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan

disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Tahapan Persiapan, Tahapan persiapan meliputi:

- 1) penetapan pelaksana kegiatan;
- 2) penyusunan rencana kerja;
- 3) sosialisasi kegiatan;
- 4) pembekalan pelaksana kegiatan;
- 5) penyiapan dokumen administrasi;
- 6) pengadaan tenaga kerja; dan
- 7) pengadaan bahan/material.
- 8) Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana

kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

b. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain:

- 1) uraian kegiatan;
- 2) biaya;
- 3) waktu pelaksanaan;
- 4) lokasi;
- 5) kelompok sasaran;
- 6) tenaga kerja; dan
- 7) daftar pelaksana kegiatan.

Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

c. Sosialisasi Kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui:

- 1) musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- 2) musyawarah dusun;
- 3) musyawarah kelompok;
- 4) sistem informasi Desa berbasis website;
- 5) papan informasi desa; dan
- 6) media lain sesuai kondisi Desa.

d. Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi:

- 1) kepala Desa;
- 2) perangkat Desa;
- 3) Badan Permusyawaratan Desa;
- 4) pelaksana kegiatan;
- 5) panitia pengadaan barang dan jasa;
- 6) kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 7) lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pembekalan untuk Tim Pelaksana meliputi, antara lain:

- 1) pengelolaan keuangan Desa; antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- 2) penyelenggaraan pemerintahan Desa; antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- 3) pembangunan Desa; seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan bupati/walikota.

e. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) dokumen RKP Desa beserta lampiran;
- 2) dokumen APB Desa;
- 3) dokumen administrasi keuangan;
- 4) dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- 5) daftar masyarakat penerima manfaat;
- 6) pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- 7) penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
- 8) penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- 9) penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

10) penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan

11) laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

f. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) pendataan kebutuhan tenaga kerja;
- 2) pendaftaran calon tenaga kerja;
- 3) pembentukan kelompok kerja;
- 4) pembagian jadwal kerja; dan
- 5) pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
- 2) penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
- 3) menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- 2) pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- 3) pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
- 4) pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- 5) penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa. Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

- 1) pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
- 2) pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas asset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- 1) peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
- 2) pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin dilakukan melalui APB Desa. Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola. Dalam hal mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/ atau jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- 2) pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- 3) perubahan pelaksanaan kegiatan;
- 4) pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

- 5) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- 6) musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- 7) pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

h. Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Rapat kerja membahas antara lain:

- 1) perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 2) pengaduan masyarakat;
- 3) masalah, kendala dan hambatan;
- 4) target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
- 5) perubahan kegiatan.

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

i. Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai

dengan dokumen RKP Desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli di desa yang bersangkutan, kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

- 1) tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- 2) tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
- 3) tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan dan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

j. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- 1) kenaikan harga yang tidak wajar;
- 2) kelangkaan bahan material; dan/atau
- 3) terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 - a) swadaya masyarakat,
 - b) bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - c) bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- 2) tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
- 3) tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan. Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan. Hasil kesepakatan rapat kerja dituangkan dalam berita acara yang dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran

biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

Berita acara tersebut menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

k. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- 1) penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
- 2) pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
- 3) penetapan status masalah; dan
- 4) penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- 5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 6) menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - 7) mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - 8) menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - 9) melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - 10) mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa. Dalam hal musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
- 2) foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
- 3) foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
- 4) foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
- 5) foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
- 6) gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

m. Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan

Pembangunan Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara:

- 1) menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
- 2) menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Tanggapan masyarakat Desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa

n. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa, dilaksanakan dengan cara:

- 1) melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
- 2) membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
- 3) pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa dengan keputusan kepala Desa.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Sutarto, Soediyono dan A.D. Suharsono, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Program Pembangunan Berkelanjutan dengan mengambil kasus proyek dalam Program Pengembangan Wilayah (PPW) di sebuah Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Program pemberian bantuan temak dengan sistem bergulir. Hasil penelitian mengindikasikan sudah adanya kecenderungan pengelolaan program yang bersifat *Bottom Up Planning*. Hal tersebut ditunjukkan dengan diberikannya peluang kepada masyarakat miskin untuk memilih sendiri anggota masyarakat calon penerima gaduh temak berikutnya berdasarkan kriteria Miskin, Potensial

dan Produktif (MPP). Kelonggaran ini juga didukung dan atau tidak mendapat campur tangan yang ketat dari pemerintah lokal, dalam hal ini aparat pemerintah kecamatan hanya sebagai fasilitator.

Namun demikian di sisi yang lain penelitian ini juga menyimpulkan masih adanya pengendalian yang kaku dengan menggunakan sistem komando (alur hirarki) terutama dari aparat pemerintah kabupaten (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) terhadap aparat kecamatan. Dalam kasus ini. Aparat kecamatan tidak boleh mengubah jenis program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

2. Iskandar Mirsa (1998), dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan suatu studi di Desa Cibeusi dan Desa Sayang Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang, menyimpulkan bahwa dalam asumsi teori pembangunan yang berpusat pada masyarakat tampaknya masih belum optimal, hal tersebut diindikasikan oleh kenyataan bahwa program yang sudah dilaksanakan sejak 1992/1993 ternyata sampai dengan tahun 1996/1997 belum terlaksana dengan sepenuhnya. Penyusunan program pembangunan masih lebih banyak berasal dari atas dan bukan dari masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Dalam kaitannya dengan program pembangunan desa, ditemukan banyak proyek sektoral yang tidak berfungsi dengan baik, hal ini karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa tersebut.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisa data agar permasalahan tidak menjadi kabur dan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah–istilah yang digunakan, maka diperlukan definisi konsep. merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena sosial atau alami. Pentingnya definisi konsep merupakan definisi yang perlu diamati, karena konsep menentukan adanya hubungan empiris.

Dari uraian diatas, maka penulis menguraikan definisi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pelaksanaan program pembangunan desa adalah suatu Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau masyarakat desa yang meliputi : Pembangunan desa yang berskala lokal dan Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan program pembangunan tersebut meliputi empat bidang di antaranya :

1. .Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah segala aktivitas, tugas fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga desa yang punya kewenangan dalam mengelola dan mengatur jalannya sistim pemerintahan Desa ; Dengan sub fokus
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan adalah Jumlah pendapatan yang diterima oleh aparat Desa dalam kurun waktu satu tahun begitu juga dengan tunjangan , namun yang memperoleh tunjangan hanya Kepala Desa dan sekretaris Desa non PNS
 - b. Operasional Perkantoran adalah segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dikantor baik yang berhubungan dengan anggaran maupun dalam pelayanan rutinitas di kantor yang dilakukan oleh pemerintah

Desa, termasuk ATK dan saran lainnya yang dibutuhkan yang dibutukannya

- c. Operasional BPD adalah Kegiatan yang dilakukan oleh BPD, dan tidak termasuk dari kegiatan pemerintah desa, karena bpd adalah lembaga mitra pemerintah desa untuk bersama didalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan mitra dari pemerintah Desa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayah Desa tersebut.
- d. Kegiatan sarana dan prasarana Kantor Desa adalah semua kegiatan yang keterkaitan dengan sarana atau alat yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program pembangunan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPDes dan APBDesa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa jangka waktu satu tahun, karena RKPDesa juga merupakan penjabaran dari RPJMDesa satu periode Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah jumlah pendapatan desa yang diperoleh dari perimbangan pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten, yang disebut dana ADD dan Pendapatan dana transfer dari Pusat melalui rekening Pemerintah kabupaten dan dilanjutkan ke rekening Desa, Sedangkan belanja Desa adalah belanja yang mencakup empat bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan

- e. Kegiatan musyawarah dan Penyusunan LKPJDesa IPPD Desa adalah kegiatan untuk menyusun pertanggung jawaban persemester, Karena setiap pencairan dana harus dilaporkan ke Kabupaten/kota
2. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa adalah Kebijakan Pemerintah untuk untuk merubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan yang mencakup :
 - a. Kegiatan Pemenuhan kebutuhan Dasar adalah kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,dimana masyarakat sngat membutuhkan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
 - b. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasaran desa adalah kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap inkaperkavita masyarakat, karena mayoritas masyarakat adalah hidup dari pertanian
 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik atau dengan defenisi lain suatu usaha untuk pembinaan kepribadian dan mandiri.; dengan sub fokus
 - a. Pembinaan dan fasilitas LKSMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selalu diadakan pembinaan agar mampu mandiri dan berhasil guna dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat
 - b. Pembinaan dan fasilitas PKK adalah Lembaga ini khusus organisasi yang mayoritas anggotanya adalah kaum perempuan dan dilakukan

- pembinaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa pada umumnya
- c. Pembinaan Pemuda adalah pembinaan yang dilakukan pada generasi muda untuk dapat mengembangkan dirinya, mandiri dan berhasil guna.
 - d. Pembinaan dan fasilitas hansip adalah Pembinaan yang dilakukan sebagai penanggungjawab dan keamanan dalam masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun potensi guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang Pemberdayaan ;memeberikan pengetahuan sesorang untuk lebih bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan dan sangat efiesiensi; dengan sub fokus :
- a. Pelatihan sistem aplikasi Desa adalah pelatihan yang diperuntukan untuk aparat yang telah ditunjuk oleh Kepala desa untuk melakukan laporan secara on line bukan lagi manual
 - b. Pelatihan Kades dan Aparat Desa adalah pelatihan tentang manajemen dan pengelolaan pemerintahan Desa mulai dari penyusunan RPJMDesa RKPDesa, APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban desa.
 - c. Peningkatan Kapasitas dan manajemen Pemerintahan Desa adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas di dalam memanejemen pemerintahan Desa.
 - d. Pelatihan KPMD Pemberdayaan tehnis adalah Pelatihan Kelompok Pemberdayaan masyarakat Desa adalah bagaimana masyarakat desa

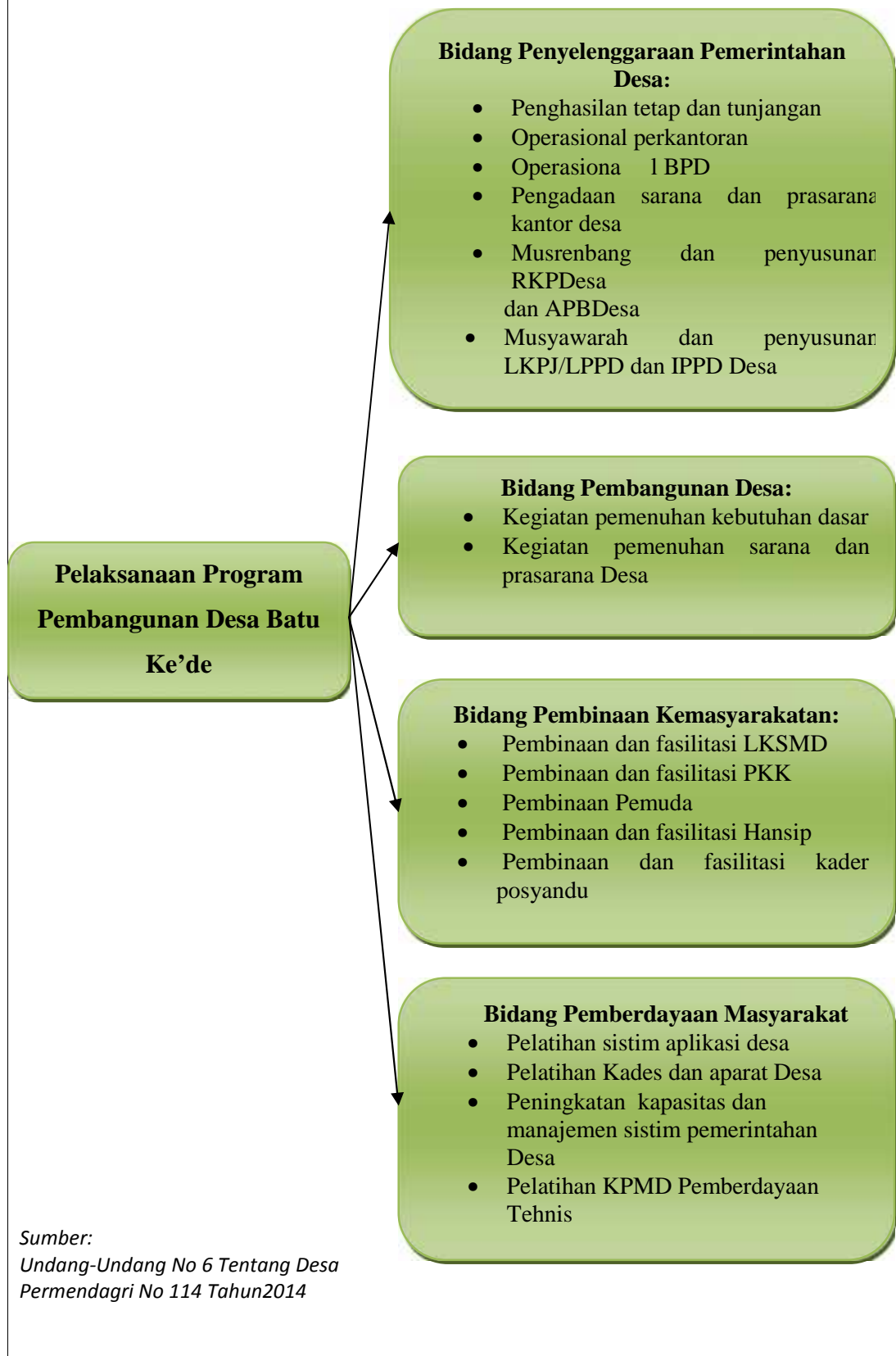
punya kemampuan dalam mengelola dan mengatur pembangunan Desa .

- e. Pembiayaan adalah penyertaan Modal BUMDES yang dikelola secara otonomi tanpa campur tangan dengan pemerintah Desa.

D.Kerangka Konsep

Desa Batu Ke'de, merupakan salah satu desa di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa seperti musrenbang., sehingga mempengaruhi partisipasi untuk terjun secara langsung kepada pemerintah desa yang hanya melaksanakan tugas pokok dari pemerintah pusat. Untuk menunjang pembangunan desa maka masyarakat juga ikut ambil bagian didalam pelaksanaan dan penilaian hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah desa. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan skematis seperti berikut dibawah ini :

Gambar 1.
Kerangka Konsep



D. Pertanyaan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti mendiskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai analisis pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan desa dalam bidang pembangunan Desa?
3. Bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan?
4. Bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan program pembangunan Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.

Pendekatan ini digunakan karena data penelitiannya diambil dari data hasil wawancara atau penelitian subjek yang diamati, dimana pengumpulan data-data ini ditulis dalam bentuk laporan data berupa kata-kata dan gambar yang kemudian dapat dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2017 secara studi lapangan dengan melakukan wawancara dan telaah dokumen di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Hal ini

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis yaitu pelaksanaan program pembangunan Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung, dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan informan yang mempunyai pengetahuan dan ketelibatan dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Batu Ke'de. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen yang ada di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.

Adapun informan yang akan memberikan data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian adalah:

1. Kepala Desa	: 1 Orang
2. Kepala Dusun	: 1 Orang
3. Bendahara Desa	: 1 Orang
4. BPD	: 1 Orang
<hr/>	
Total	: 4 Orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara yaitu peneliti mengadakan serangkaian wawancara kepada sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan yang

dibutuhkan. Instrumen digunakan berupa pedoman wawancara. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung kepada sejumlah informan dan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Cara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur tapi tetap berpegang pada pedoman wawancara.

Alasan penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu karena dalam wawancara ini penulis belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

b. Observasi.

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembangunan di desa, dimana peneliti memperhatikan secara langsung seluruh kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat. Instrumen yang digunakan berupa data observasi.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap dapat menunjang penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dari kegiatan sebelumnya nantinya akan digunakan sebagai sebagai data primer.

Alasan penulis menggunakan teknik ini karena teknik ini dapat digunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah wawancara langsung, observasi lapangan dan telaah dokumen sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana data yang telah penulis sebutkan di atas maka instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk mewawancarai informan dimana sebelumnya telah disiapkan daftar pernyataan-pernyataan yang akan dipertanyakan kepada informan

Alasan penulis menggunakan pedoman wawancara mempermudah penulis dari informan sebab pertanyaan yang diajukan telah terstruktur dan sistematis.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi garis-garis yang dianggap penting untuk diamati dalam penelitian yang kaitanya dengan pelaksanaan program pembangunan Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang.

Alasan penulis menggunakan pedoman observasi yaitu untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang kegiatan pengamatan

secara langsung terhadap objek yang penulis teliti dan sebagai pembanding antara jawaban informan dengan kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan terkait dengan hal yang teliti.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen berupa lembaran kertas berisi dokumen- dokumen dan data –data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti. Pedoman ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode penelitian, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok sehingga terjadi suatu perubahan dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, mengelompokkan data berdasarkan keterkaitan antarkomponen secara manual ataupun dengan menggunakan computer.

2. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh penulis tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisis data yaitu proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, Serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono (2005:50) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Sugiono (2005:50-52) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda, (2) triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, (3) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti, dan (4) triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

1. Keadaan Geografis

Desa Batu Ke'de adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Masalle dan berada di bagian Barat Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Batu Ke'de dari Ibukota Kabupaten Enrekang 53 Km. Desa ini memiliki luas wilayah 8,733 Km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya lahan perkebunan, lahan pertanian dan hutan.

Letak geografis Desa Batu Ke'de berada di wilayah barat Kabupaten Enrekang. Adapun batas wilayah Batu Ke'de adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tongko.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ke'de
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tongkonan Basse
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baroko.

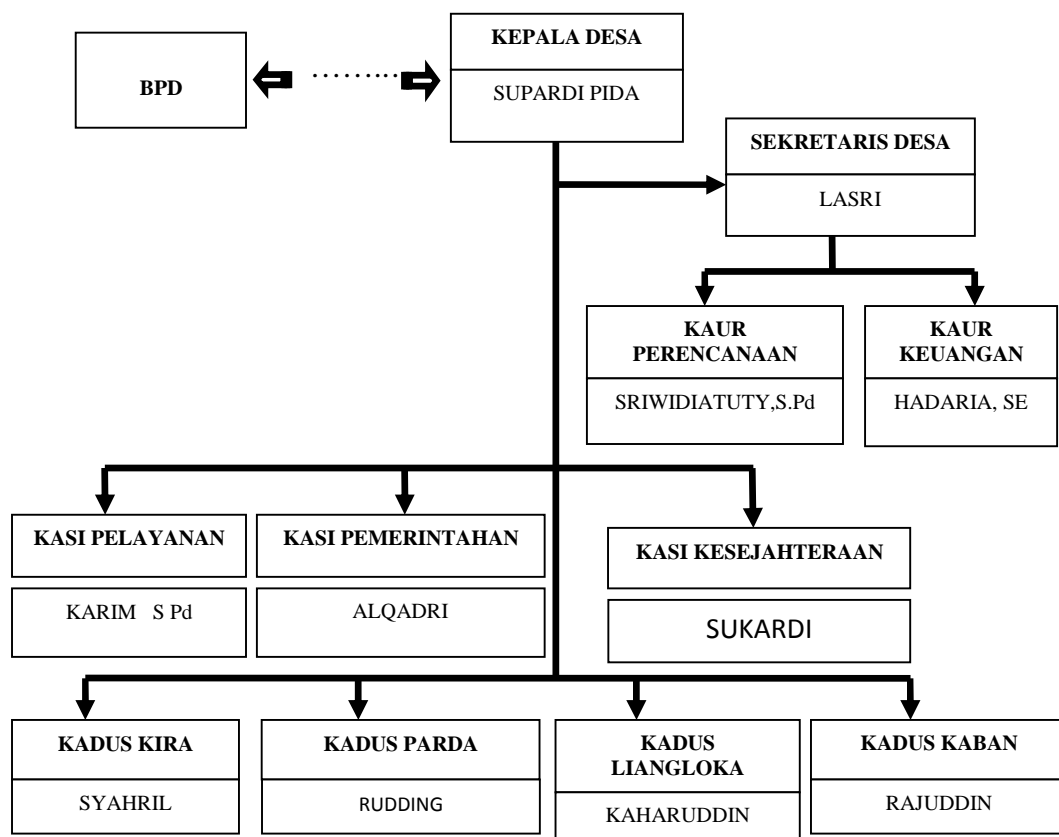
Secara geografis Desa Batu Ke'de memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada diatas gunung dengan ketinggian 1 200 m sampai 1 600 m diatas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Batu Ke'de sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan.

2. Keadaan Demografis

Batu Ke'de memiliki luas wilayah 8,733 Km². Kepadatan penduduk sudah mencapai 2 745 jiwa penduduk tetap dengan jumlah kepala keluarga 646, penduduk laki-laki sebanyak 1 400 jiwa dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 1 345 dari seluruh jumlah penduduk. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini.

Masyarakat Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang 100% beragama Islam. Sebagian besar masyarakat mayoritas petani.

3. Struktur Pemerintah Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang



Sumber: Perdes No 4 tahun 2016

B..Karakteristik Sumber Data

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Batu Ke'de pada tahun 2017 sebanyak 2 745 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 644, penduduk laki-laki sebanyak 1 400 jiwa atau 52% dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 1 345 atau 48% dari seluruh jumlah penduduk.

4. Usia

Struktur umur penduduk penting untuk diketahui karena struktur umur penduduk dapat memberikan petunjuk penting dalam pelaksanaan pembangunan misalnya dengan mengetahui struktur umur, kita dapat mengetahui penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga kerja. Struktur umur penduduk Desa Batu Ke'de disajikan pada tabel berikut:

Tabel
Kelompok Usia Masyarakat Desa Batu Ke'de

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Usia Balita	409	14,9%
2.	Usia Sekolah	1 016	37,0%
3.	Usia Kerja	749	27,3%
4.	Usia Lanjut	571	20,8%
Total		2.745	100%

Sumber: Profil Desa Batu Ke'de 2017

Tabel diatas memberikan gambaran mengenai keadaan serta perkembangan penduduk di Desa yang bersangkutan, nampak bahwa usia

sekolah merupakan kelompok usia terbanyak dibanding kelompok usia lainnya yaitu 1 016 atau 37,0 persen sedangkan kelompok usia paling sedikit adalah usia balita yaitu 409 atau 14,9%.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perekonomian dan pembangunan disuatu daerah dan sekaligus dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa, bahwa sangat penting dalam memberantas kemiskinan. Pendidikan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat kualitas SDMnya, suatu daerah cenderung akan memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang lebih tinggi. Sebaran penduduk Desa Batu Ke'de menurut tingkat pendidikan disajikan berikut:

Tabel
Tingkat Pendidikan Desa Batu Ke'de

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Buta Aksara	546	19,9%
2.	Tidak Tamat SD	321	11,7%
3.	Tamat SD	667	24,3%
4.	Tamat SMP	335	12,2%
5.	Tamat SMA	483	17,6%
6.	D-3	66	2,4%
7.	S-1	327	11,9%
Total		2.745	100%

Sumber: Profil Desa Batu Ke'de 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Batu Ke'de relatif bervariasi, buta aksara sebanyak 546 orang atau 19,9%, tidak tamat SD sebanyak 321 orang atau 11,7%, tamat SD sebanyak 667 orang atau 24,3 persen, tamat SMP sebanyak 335 orang atau 12,2%, tamat SMA sebanyak 483 orang atau 17,6%, jenjang pendidikan D-3 sebanyak 66 orang atau 2,4% dan masyarakat yang berpendidikan Sarjana sebanyak 327 orang atau 11,9 persen saja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Batu Ke'de masih rendah.

Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk pada lokasi penelitian, juga ditunjukkan tidak adanya masyarakat yang pernah mengikuti pendidikan non formal seperti kursus atau pelatihan. Hal tersebut disebabkan sibuknya masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada waktu untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus-kursus, demikian juga tidak pernah ada program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

6. Pekerjaan

Penduduk Batu Ke'de mempunyai mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar sumber mata pencaharian Batu Ke'de adalah sektor dari Petani. Petani merupakan sumber mata pencaharian yang utama di Batu Ke'de, penduduk desa tersebut ada yang sebagai pedagang, guru dan lain-lain. Jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Jenis Pekerjaan Desa Batu Ke'de

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Petani/Pekebun	1.284	46,8%
2.	Pelajar/Mahasiswa	121	4,4%
3.	Ibu Rumah Tangga	546	19,9%
4.	Pedagang	38	1,4%
5.	Pegawai Swasta	6	0,2%
6.	Pensiunan	17	0,6%
7.	Guru/Dosen	19	0,7%
8.	Industri/Wiraswasta	33	1,2%
9.	Buruh Tani	107	3,9%
10.	Bidan/Tenaga Medis	17	0,6%
11.	Pegawai Negeri	19	0,7%
12.	Belum/Tidak Bekerja	538	19,6%
Total		2.745	100%

Sumber: Profil Desa Batu Ke'de 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagaian besar masyarakat Batu Ke'de bekerja sebagai petani sebanyak 1 284 jiwa atau 46,8%, masyarakat yang berkerja sebagai pelajar sebanyak 121 jiwa atau 4,4%, masyarakat yang berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 546 jiwa atau 19,9%, masyarakat yang berkerja sebagai pedagang sebanyak 38 jiwa atau 1,4%, masyarakat yang berkerja sebagai pegawai swasta sebanyak 6 jiwa atau 0,2%, masyarakat yang berkerja sebagai pensiunan sebanyak 17 jiwa atau 0,6%, masyarakat yang berkerja sebagai guru sebanyak 19 jiwa atau 0,7%, masyarakat yang berkerja sebagai wiraswasta/industri sebanyak 33 jiwa atau 1,2%, masyarakat yang berkerja sebagai Buruh tani sebanyak 107 jiwa atau 3,9%, masyarakat yang berkerja sebagai bidan/tenaga medis sebanyak 17

jiwa atau 0,6%, masyarakat yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 jiwa atau 0,7%, masyarakat yang belum berkerja atau tidak bekerja sebanyak 538 jiwa atau 19,6%.

B. Deskripsi Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pelaksanaan Program pembangunan Desa Batu Ke'de, yang meliputi empat bidang. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan..

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah segala aktivitas, tugas fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga desa yang punya kewenangan dalam mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan Desa. Bidang ini mencakup beberapa kegiatan :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan adalah penghasilan yang didapat oleh pemerintah Desa selama satu tahun, Namun tidak semua pemerintah Desa mendapat tunjangan, yang memperoleh penghasilan tetap adalah: Kepala Desa satu orang, Sekretaris satu orang (non PNS), Kaur dua orang, Kepala Seksi tiga orang dan empat kepala Dusun atau kepala Wilaya. Besaran siltap yang diterima oleh pemerintah Desa adalah RP 90 000 000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rician: Kepal Desa Rp 26 400 000,- Kepala seksi tiga orang Rp 21 600 000,=,Kepala urusan dua orang Rp 21 600 00,- Kepala Dusun empat orang Rp 28 800 000,-

- a) Sedangkan Pemerintah Desa yang menerima tunjangan hanya Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Non PNS). Besarnya Rp 11 400 000,-
- b) Tunjangan jabatan lain selain yang diatas juga diperoleh BPD yaitu ketua satu orang. Meemperoleh Rp 1 800 000,Wakil Ketua satu orang,Rp 1 560 000 Sekretaris satu orang, Rp 1 560 000,- dan anggota BPD sendiri sebanyak delapan Orang.Rp 8 400 000,-

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaannya diperuntukkan bagi pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan aparatnya yang termasuk aparat adalah sekretaris desa satu orang, kepala seksi tiga orang yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan umum, dan adalagi dibawahnya sekretaris namanya kepala urusan pembangunan. Selain itu ada empat orang sebagai kepala dusun, 1 kepala wilayah, jadi jumlah personil yang termasuk pemerintahan di Desa Batu Ke'de sebanyak 11 orang semuanya. Keseblas inilah yang dibayar atau memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, adapun nominalnya sebesar yang tertera di tabel (APBDes 2016).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya diperuntukkan bagi pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan aparatnya yang termasuk aparat adalah dekreteraris desa satu orang, kepala seksi tiga orang yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan umum, dan adalagi dibawahnya sekretaris namanya kepala urusan pembangunan. Selain itu ada empat orang sebagai kepala dusun, 1 kepala wilayah, jadi jumlah personil yang termasuk pemerintahan di Desa Batu Ke'de sebanyak 11 orang semuanya. Keseblas inilah yang dibayar atau memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Sementara wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang menerima setiap penghasilan tetap adalah kepala Desa satu orang, sekretaris non PNS 1 orang, kepala seksi tiga orang, dua kepala urusan dan empat orang kepala Dusun.”

Penerima penghasilan tetap di Desa Batu Ke'de adalah kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi tiga orang, kepala urusan, dan empat orang kepala dusun.

b. Operasional perkantoran adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa terkait dengan pelayanan dan seluruh kegiatan administrasi di Kantor Desa Batu ke'de. di antaranya adalah:

- a) Alat Tulis Kantor (ATK); Kertas HVS (Rp 1 083 000, Maf File. (Rp 300 000,-) Isolasi Rp 75 000. Rp 31 000, Maf Biasa Rp 26 000, Stabilo Rp 11 000 ,Blangko pajak Rp 25 000, Penjepit kertas Rp 20 000, tinta printer Epson Rp 480 000, tinta printer canon 210 000, Anplon panjang lem. Rp 66 000
- b) Perangko Materai dan seluruh benda pos lainnya ; materai 6.000 dan 3.000 rupiah. sebanyak Rp 835 000.
- c) Cetak penggandaan dan photo copy; photo copy dan jilid buku. Rp 1 350 000,-
- d) Pemeliharaan peralatan Kantor; Printer dan komputer desa Rp 1 660 000,-
- e) Pemeliharaan, perawatan Kendaraan; motor Dinas 1 500 000.

- f) Pemeliharaan Kantor desa: pipa 3". Pipa 2 " Sambungan L pipa 3" Sambungan lurus pipa 3/2", Lem pipa , Kawat aluminium. (Rp 412 000,-)
- g) Belanja makan minum rapat.Nasi Kotak, snack. Aqua gelas. Rp 700 000 .
- h) Belanja pakaian dinas dan khusus beserta atributnya.Kades, Sekdes, Aparat desa (Baju Olah raga).senilai Rp 3 000 000,
- i) Belanja perjalan Dinas, Perjalan Dinas ada dua perjalan dinas dalam daerah (Kades Rp 10 000 000,-) dan Aparat Desa Rp 3 600 000,-.Perjalanan Dinas luar daerah.yang terlibat didalamnya adalah Kades dan aparatnya.senilai Rp 7 000 000,-
- j) Belanja BPJS Kesehatan untuk Kepala desa dan juga kepada sekretaris non PNS(Rp 9 000 000,-).Belanja pembayaran listrik: vocer listrik dan dan biaya mutasi KWH.(Rp 1 400 000,-)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan operasi perkantoran adalah semua kebutuhan yang di perlukan dikantor terkait dengan pelayanan ATK dan sarana kantor lainnya yang dibutuhkan.”

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam operasional perkantoran: dikepalai oleh kepala desa, sekretaris untuk verifikasi, bendahara (pelaksana kegiatan), dan kasi pemerintahan.”

Pada operasional perkantoran dikepalai oleh kepala desa, kemudian sekretaris yang bertugas untuk melakukan verifikasi, bendahara selaku pelaksana kegiatan dan kasi pemerintahan.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Utamanya dilakukan dalam operasional perkantoran, pengadaan ATK, Komputer laptop, meja kerja, serta alat-alat lain yang berhubungan dengan pelayanan.”

Upaya yang dilakukan dalam operasional perkantoran yaitu pengadaan ATK, Komputer laptop, meja kerja, serta alat-alat lain yang berhubungan dengan pelayanan.

- c. Operasional BPD adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPD untuk membiayai kegiatan dalam organisasi tersebut,
- a) Biaya rapat termasuk snack/Aqua gelas senilai Rp 325 000,
 - b) Serta perjalanan dinas dalam daerah pengurus BPD.(Rp 680 000,-)

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Operasional pelaksanaan BPD, biaya yang dikeluarkan oleh BPD apabila melaksanakan kegiatan rapat termasuk ATK dan snack.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk pengadaan sarana dan prasarana kantor nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh Kepala Desa.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam operasional BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris BPD, ditambah delapan orang. Jumlah keseluruhan adalah 11 orang yang resmi dilantik menjadi pengurus dan anggota BPD.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam operasional BPD melibatkan ketua, wakil ketua, sekretaris BPD, ditambah

delapan orang. Jumlah keseluruhan adalah 11 orang yang resmi dilantik menjadi pengurus dan anggota BPD.

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Utamanya yang dilakukan oleh BPD melakukan rapat, koordinasi antara anggota, pengurus untuk membahas bilamana ada yang mendasar untuk di koordinasikan.”

Upaya yang dilakukan dalam operasional BPD yaitu melakukan rapat, koordinasi antara anggota, pengurus untuk membahas apabila ada hal yang mendasar untuk di koordinasikan.

d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa; adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana yang dibutuhkan di Kantor desa termasuk:

- a) :Meja kerja (kayu) empat buah,(Rp 4 800 000,-).
- b) Slide projector satu unit (Rp 5 000 000,-) ,
- c) Televisi (Rp 3 000 000,-) satu set, parabola (Rp 1 300 000,-
- d) Satu unit alat komunikasi (HT) seharga Rp 1 800 000,-
- e) Kursi plastic 15 buah (Rp 1 500 000,-, Printer satu buah. (Rp 1 800 000,-)
- f) Kegiatan Penyusunan dan pendayagunaan profil Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim yang telah di SK kan oleh Kepala Desa untuk membuat profil Desa atau data-data yang menyangkut situasi yang ada di desa Batu Ke'de. Kegiatan ini yang dibiayai diantaranya: Belanja barang dan jasa :
- g) Cetak penggandaan dan foto copy (Rp 90 000,-)

- h) Honor tim pelaksana sebesar (Rp 1 620 000,-) dan masing –asing mendapat Pembina, Ketua dan anggota empat orang memperoleh Pembina adalah Kepala Desa memperoleh (Rp 360 000,-), Ketua adalah Sekretaris (Rp 300 000,-) anggota adalah Kelompok masyarakat sebanyak empat dan memperoleh sebanyak (Rp 960 000,-) orang, tim ini memperoleh selama tiga bulan,

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh siapa. Pelaksana kegiatan diketahui oleh kepala desa penerimaan barang dilakukan pembayaran melalui pemegang kas dengan menggunakan kode rekening dan setiap jenis barang harus dibuatkan nota pesanan.”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh siapa. Pelaksana kegiatan diketahui oleh kepala desa penerimaan barang dilakukan pembayaran melalui pemegang kas dengan menggunakan kode rekening dan setiap jenis barang harus dibuatkan nota pesanan.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor (pelaksana kegiatan) adalah kasi pemerintahan.”

Berdasarkan wawancara diatas amak dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor melibatkan kasi pemerintahan.

e. Kegiatan musrenbang dan penyusunan RKPDes dan APBDes adalah suatu kegiatan yang dilakukan dimana hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang rangkum atau dituangkan kedalam penyusunan tersebut yang meliputi empat bidang :

- a) Bidang peyelenggaraan pemerintahan
- b) Bidang Pembangunan
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d) Bidang pemberdayaan lembaga Desa .

Keempat bidang ini yang termuat dalam RKPDes dan setelah pagu anggran dari Kabupaten/Kota telah ditetapkan maka segeralah dilaksanakan penyusunan yang berikutnya yaitu penyusunan APBDes. Yang dibiayai dalam kegiatan ini diantaranya:

- a) Belanja barang dan jasa cetak penggandaan, foto copy dan jilid buku.seharga Rp 56 000,-)
- b) Belanja makan dan minum, Nasi Kotak 75 Dos (Rp 1 500 000,-) snack 75 Dos (Rp 750 000,-, aqua gelas 2 Dos (Rp 50 000,-)
- c) Honor tim 11; Pembina satu orang adalah Kepala Desa (Rp 360 000,-),Ketua satu orang adalah sekretaris (Rp 300 000,-) dan Sembilan anggota tim dari unsur tokoh masyarakat masing memperoleh Rp 150 000,- untuk kegiatan ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan musrenbang biasanya diawali dengan pelaksanaan musyawarah dusun untuk mengusulkan bidang/kegiatan apa yang

Pada musrenbang yang dilaksanakan di Desa Batu Ke'de melibatkan perwakilan dari masyarakat BPD, aparat pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, BUMNDes dan lembaga-lembaganya yang ada di desa, PKK, kelompok tani dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBDes.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Utama yang dilakukan dalam sarana dan prasarana kantor pelaksana kegiatan menyusun barang sesuai yang ada di APBD.dan selambat-lambatnya diterima tiga hari setelah pelaksanaan barang jadi dan setelah di terima di buat lagi nota penerimaan barang yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan lalu di bayar oleh pemegang kas.(bendahara desa).”

Mengenai sarana dan prasarana kantor, upaya yang akan dilakukan adalah pelaksana kegiatan menyusun barang sesuai yang ada di APBD.dan selambat-lambatnya diterima tiga hari setelah pelaksanaan barang jadi dan setelah di terima kemudian membuat nota penerimaan barang yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan, lalu di bayar oleh pemegang kas.(bendahara desa).

- f. Kegiatan Musyawarah dan penyusunan LKPJ/LPPD adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk membahas Laporan Kegiatan pertanggung jawaban untuk tiap pencairan dana karena dalam satu tahun anggaran dilakuan dua kali pencairan anggaran.yaitu tahap pertama sebesar 60 per seratus dan 40 perseratus dari total anggaran.yang dibiayai dalam kegiatan ini adalah : Belanja barang dan jasa:

- a) cetak foto copy sebanyak dua puluh lembar dengan harga (Rp 300 / lembar dan jilid buku seharga 10 000 rupiah sebanyak lima buah jadi jumlah belanja cetak photo copy (Rp 790 000,-)
- b) .Belanja makan dan minum yaitu nasi kotak sebanyak 15 Dos dengan harga (Rp 20 000,-) dan snack 15 dos seharga (Rp 10 000,-) dan aqua gelas sebanyak dua dos dengan (Rp 25 000,-) /dos total Belanja makan minum sebesar Rp 475 000.-
- c) Operasional Petugas dan Pelaku lainnya adalah biaya yang diperuntuhkan bagi petugas dan pelaku operasional lainnya.
 - a) KPMD, adalah kelompok pemberdayaan masyarakat yang menerima honor, sebanyak 12 orang dan tiap orang menerima sebanyak (Rp 150 000,).
 - b) Honor TPK yaitu ketua satu orang diterima sebanyak Rp 150 000,- setiap bulan, juga dengan sekretaris menerima sebanyak 100 000 rupiah dan anggota tiga orang masing-masing menerima sebanyak 80 000 rupiah selama tiga bulan. Dalam satu tahun anggaran

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan dalam musrenbang desa adalah perencanaan RPJM ditempat bidang: lalu dilimpahkan bidang, kemudian setiap bidang dikelompokkan dalam kegiatan dan kegiatan ini dicermati secara cermat untuk memahami atau memprioritaskan kegiatan yang sangat dibutuhkan lalu dijadikan untuk menyusun RKPD untuk satu tahun, kemudian disusun APBDesa setelah pagu indikatif telah ditetapkan dari kecepatan/kata.”

Upaya yang dilakukan dalam musrenbang desa dan penyusunan RKPDes dan APBDes adalah perencanaan RPJM ditempat bidang: lalu dilimpahkan bidang, kemudian setiap bidang dikelompokkan dalam kegiatan dan kegiatan ini dicermati secara cermat untuk memahami atau memprioritaskan kegiatan yang sangat dibutuhkan lalu dijadikan untuk menyusun RKPDes untuk satu tahun, kemudian disusun APBDesa setelah pagu indikatif telah ditetapkan dari kecepatan/kata.

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Dokumen ini diambil dari dokumentasi Desa Batu Ke'de, pada tanggal 22 Desember 2017.



Foto: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh Kepala Desa.

Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Batu Ke'de melibatkan perwakilan dari masyarakat BPD, aparat pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, BUMNDes dan lembaga-lembaganya yang ada di desa, PKK, kelompok tani dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBDes.



Foto: Pelaksanaan Musrenbang

2. Bidang pembangunan Desa

Bidang penyelenggaraan pembangunan desa adalah kebijakan pemerintah untuk merubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan . Bidang ini terbagi jadi dua kegiatan :

- a. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar adalah suatu kegiatan yang dipeuntukan untuk;
 - a) Pembangunan posyandu satu paket senilai Rp 60 000 000,-

- b) Pengadaan alat peraga TK/KB (Paud) adalah sala satu alat untuk mainan anak-anak dan atau alat pendidikan anak usia dini sebanyak satu pake tdengan nilai Rp 4 599 000,-

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan kebutuhan dasar dilaksanakan pembangunan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan, posyandu ditingkat dusun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan pembangunan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan, posyandu ditingkat dusun.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dasar kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Perencana pelaksanaan kegiatan.”

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Perencana pelaksanaan kegiatan.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Sangat menerima dengan adanya pembangunan kebutuhan dasar (fasilitas kesehatan).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa, masyarakat sangat menerima adanya pembangunan kebutuhan dasar.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan sebelum ada pembanguna tersebut, kolom-kolom rumah masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas kebutuhan dasar.”

Pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Batu Ke'de Sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, bahkan sebelum ada pembangunan tersebut, kolom-kolom rumah masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas kebutuhan dasar.

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

s



Foto : Pembangunan Posyandu

b. Kegiatan pembangunan sarana prasarana desa.

- a) Pegecoran jalan Dusun Kira (Jln Kira Timur) nominalnya sebesar Rp 80 000 000,-

- b) Rabat Beton Jln Tani Parandean Lumika dengan nilai Rp 75 000 000,-
- c) Perintisan To Koa – Pasang senilai Rp 51 500 000,-
- d) Perkerasan Jln tani Dusun Kaban nilai Rp 80 000 000,-
- e) Perkerasan Jln Tani Balombong- To Salu nilai Rp 68 000 000.-
- f) Pengecoran Jln setapak Liangloka –Loko Lumbang nilai Rp 33 000 000,-
- g) Pegecoran Jln setapak Talakaju senilai Rp 20 000 000,-
- h) Pembangunan Dekker Jln Kurin-kurin senilai Rp 20 000 000,-
- i) Pembangunan Dekker dan tallut Jln Kampum Baru dengan nilai Rp 30 000 000,-

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani.”

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan diantaranya Pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani.

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Kaur perencanaan, verifikasi sekdes, diketahui kades persetujuan pembangunan.”

Yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan Desa yaitu Kaur perencanaan, verifikasi sekdes, diketahui kades persetujuan pembangunan.

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Sangat menerima sarana dan prasarana pembangunan itu karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat karena hasil bumi yang dipanen sudah tidak terlalu banyak (casnya) hingga yang dikeluarkan.”

Warga masyarakat Desa Batu Ke'de sangat menerima pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat karena hasil bumi yang dipanen sudah tidak terlalu banyak (casnya) hingga yang dikeluarkan.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Dapat: karena biaya produksi pertanian dan biaya panen dapat ditekan dan pendapatan masyarakat petani meningkat sekaligus mensejahterahkan masyarakat pada umumnya.”

Pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena biaya produksi pertanian dan biaya panen dapat ditekan dan pendapatan masyarakat petani meningkat sekaligus mensejahterahkan masyarakat pada umumnya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Foto: Rabat Beton Jalan Tani Parandean - Lumika

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pada bidang pembangunan desa, Desa Batu Ke'de telah melakukan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di putuskan dalam musrenbang, seperti pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani. Pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Batu Ke'de sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, bahkan sebelum ada pembangunan tersebut, kolom-kolom rumah masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas kebutuhan dasar.



Foto: Pengecoran Jalan Dusun Kira Timur

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah meningkatkan kapasitas dan menumbuhkan kinerja lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa . Bidang ini mencakup beberapa kegiatan :

a. Kegiatan Pembinaan dan fasilitas LKSMD:

- a) Belanja barang dan jasa misalnya makan minum ; Nasi Kotak (Rp 300 000,-), Snack (Rp 150 000,-) masing-masing 15 dos seharga Rp 20 000,- dan Rp 10 000,- ditambah satu dos aqua gelas seharga (Rp 25 000,-)

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan dan fasilitas LKMD, mengadakan rapat membalas, keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa.”

Bentuk pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas LKSMD yaitu mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan LKSMD yaitu ketua, sekretaris, bendahara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas LKSMD yaitu ketua, sekretaris, bendahara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

- b. Kegiatan pembinaan dan fasilitas PKK; belanja barang dan jasa yaitu
 - a) cetak penggandaan dan foto copy sebanyak 150 lembar harga perlembar Rp 300,- .
 - b) Makan minum rapat (pengajian TP PKK Tk Desa) Jumlah sebanyak Rp 650 000,- dos snack harga /dos Rp10 000,- dan aqua gelas 25 dos harga Rp 25 000,- / dos.
 - c) Perjalanan dinas dalam/Luar Daerah yang ikut pengurus PKK satu orang Rp 1 020 000,-

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan pembinaan PKK antara lain: mengadakan rapat rutin TP PKK tingkat desa diadakan selama lima kali setahun, untuk membahas keterkaitan dengan anggaran APBDes beserta dengan pelaksanaannya. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Pengurus PKK).”

Bentuk pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas PKK yaitu mengadakan rapat rutin TP PKK tingkat desa diadakan selama lima kali setahun, untuk membahas keterkaitan dengan anggaran APBDes beserta dengan pelaksanaannya. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Pengurus PKK).

Lebih lanjut wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan kegiatan PKK yaitu pengurus dan anggota PKK se-desa Batu Ke'de, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Aparat pemerintah Desa, Pengurus dan anggota BPD.”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas PKK yaitu pengurus dan anggota PKK se-desa Batu Ke'de, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Aparat pemerintah Desa, Pengurus dan anggota BPD.

c. Kegiatan pembinaan pemuda (turnamen sepak bola) yang dibiayai dalam kegiatan ini ialah :

- a) Belanja Barang dan Jasa: Honor Panitia (wasit) sebanyak tiga orang senilai Rp 200 000,- tiap orang. Dan Biaya makan minum : Nasi kotak 25 dos harga 20 000, snack 25 Kotak harga Rp 10 000 dan aqua gelas 2 dos seharga Rp 25 000,-.
- b) Belanja modal Peralatan : Pengadaan bola volley empat buah harga Rp 100 000,-/buah, pengadaan bola tagrow sebanyak dua buah dengan harga Rp 200 000,- /buah, pengadaan bola kaki tiga buah harganya Rp 250 000,-/ buah.
- c) Pengadaan Hadiah : Piala tetap dua set senilai Rp 360 000 ,Baju volley PA/PI tiga set harganya Rp 500 000,- , Baju tagrow tiga set harganya Rp 1 500 000,-. Baju bola juga tiga set senilai Rp 1 500 000,-

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembinaan pemuda yaitu mengadakan turnamen sepakbola tingkat Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan pembinaan pemuda mengadakan turnamen sepakbola tingkat desa.

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pembinaan pemuda yaitu Karang taruna, Tokoh pemuda, Hansip, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, Klub-klub sepakbola.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pembinaan pemuda yaitu Karang taruna, Tokoh pemuda, Hansip, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, Klub-klub sepakbola.

d. Kegiatan pembinaan dan fasilitas Hansip: Belanja barang dan jasa :
Belanja modal ialah pembelian Baju seragam delapan pasang harganya Rp 2 400 000,- dan sepatu harganya Rp 2 400 000,- untuk delapan unit.

kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Pengadaan baju seragam, sepatu beserta atribut lainnya.”

Bentuk pelaksanaan pembinaan dan fasilitas Hansip yaitu pengadaan baju seragam, sepatu beserta atribut lainnya.

Lebih lanjut wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam fasilitas hansip adalah anggota hansip sendiri dengan Pembina desa.”

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam fasilitas hansip adalah anggota hansip sendiri dengan Pembina Desa Batu Ke'de.

- e. Kegiatan pembinaan dan fasilitas kader posyandu ;
- a) Belanja Barang dan jasa yaitu Honor kader Posyandu sebanyak 60 orang nilainya sebanyak Rp 1 500 000,-.
 - b) Pengadaan Baju seragam Kader Posyandu lima Pasang harganya Rp 1 000 000,-
 - c) Pengadaan meja dan kursi sebanyak 15 set harganya Rp 4 500 000,-

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Dibayarkan honorium kepada kader posyandu, Pengadaan baju seragam kader posyandu, pengadaan meja dan kursi posyandu.”

Bentuk pelaksanaan pembinaan kader Poyandu seperti membayar honorium kepada kader posyandu, Pengadaan baju seragam kader posyandu, pengadaan meja dan kursi posyandu.

Kemudian hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pembinaan kader posyandu adalah semua pengurus dan anggota posyandu se-Desa Batu Ke'de.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pembinaan fasilitas kader posyandu adalah semua pengurus dan anggota posyandu se-Desa Batu Ke'de.

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Foto: Pembinaan Fasilitas Kader LKSMD

Dokumen ini diambil dari dokumentasi Desa Batu Ke'de, pada tanggal 22 Desember 2017.

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pada bidang pembinaan kemasyarakatan, mulai dari pembinaan fasilitas LKSMD, pembinaan fasilitas PKK, pembinaan pemuda, pembinaan fasilitas hansip, sampai pembinaan kader Poyandu dilakukan dengan mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa untuk kemajuan Desa Batu Ke'de.

4. Bidang Pemberdayaan Aparat Desa

Bidang Pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk membangun potensi guna meningkatkan keterampilan seseorang atau sekelompok orang; memberikan pengetahuan kepada seseorang untuk lebih

bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan mereka. Kegiatan dalam bidang ini adalah:

- a. Pelatihan sistim aplikasi Desa yang terlibat dua orang yang dilaksanakan di luar daerah (Propinsi) selama tiga hari dan menelan biaya sebanyak Rp 5 100 000,- .

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa dilakukan diluar daerah (provinsi) dengan mengikutsertakan dua peserta yang dilaksanakan selama tiga hari.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa dilakukan diluar daerah (provinsi) dengan mengikutsertakan dua peserta yaitu dari aparat desa yang dilaksanakan selama tiga hari.

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelatihan sistem aplikasi desa adalah kaur perencanaan dan kaur keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam pelatihan sistem aplikasi desa adalah kaur perencanaan dan kaur keuangan.

- b. Pelatihan Aparat Desa yang terlibat tiga orang juga dilaksanakan di luar daerah (Propinsi) dengan menelan biaya sebanyak Rp 9 600 000,-

Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Bentuk pelatihan kades dan aparat tidak jauh beda dengan pelatihan sistem aplikasi keuangan Desa, hanya saja waktu, tempat dan materinya berbeda dan otomatis fasilitator pasti berbeda.

Begitu juga dengan aparat desa, materi sama namun yang membedakan adalah tidak bersamaan kepada desa dan staf ataupun sekretaris.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelatihan kades dan aparat tidak jauh beda dengan pelatihan sistem aplikasi keuangan Desa, hanya saja waktu, tempat dan materinya berbeda dan otomatis fasilitator pasti berbeda. Begitu juga dengan aparat desa, materi sama namun yang membedakan adalah tidak bersamaan kepada desa dan staf ataupun sekretaris.

Lebih lanjut kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Kepala desa satu orang, sekretaris satu orang dan kaur pemerintahan satu orang.

Yang terlibat dalam peningkatan kapasitas dan manajemen sistem pemerintahan desa yaitu Kepala desa satu orang, sekretaris satu orang dan kaur pemerintahan satu orang.

- c. Peningkatan Kapasitas Manajemen sistim pemerintahan desa yang terlibat Kepala Desa dan dilaksanakan diluar propinsi selama tiga hari dengan menelan biaya sebanyak Rp 9 000 000,-

Wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari di Hotel.”

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa, Bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari di Hotel.

Wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Tokoh pemuda yang memahami, dan mengoperasikan computer.”

Yang terlibat dalam pelatihan KPMD pemberdayaan teknis yaitu tokoh pemuda yang memahami dan mampu mengoperasikan komputer.

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Foto: Pelatihan Sistem Aplikasi Keuangan Desa

d. Pelatihan KPMD dua orang juga dilaksanakan diluar daerah selama tiga hari dengan biaya sebanyak Rp 3 500 000,-

Wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelatihan KPMD adalah dilaksanakan diluar daerah selama tiga hari.”

Sejalan dengan bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa, bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa dan bentuk pelatihan KPMD juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari di Hotel.

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pada bidang pemberdayaan masyarakat, dilakukan

dengan upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas di dalam manajemen pemerintahan Desa. Termasuk melakukan pelatihan sistem aplikasi keuangan desa, pelatihan kades dan aparat, pelatihan kapasitas, manajemen sistem pemerintah desa dan bentuk pelatihan

KPMD dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari. Dengan memnelan biaya Rp 3 500 000,- (tiga juta lima ratus ribuh rupiah). Dan yang terlibat dalam kegiatan ini diupayakan kelompok pemberdayaan masyarakat desa,yang dianggap punya wawasan luas keterkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan desa.yang mencakup empat bidang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.Bidang itu antanya : Penyelenggaraan pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan dan Bidang pemberdayaan stap desa dan atau kelompok masyarakat Desa.

Dokumen ini diambil dari dokumentasi Desa Batu Ke'de, pada tanggal 22 Desember 2017.



Foto: Pelatihan Sistem KPMPD

C. Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai, Pelaksanaan program pembangunan di desa Batu ke'de adalah suatu Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau masyarakat desa yang meliputi : Pembangunan desa yang berskala lokal dan Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan program pembangunan tersebut meliputi empat bidang di antaranya : Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah segala aktivitas, tugas fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga desa yang punya kewenangan dalam mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan Desa. Bentuk pelaksanaan penghasilan tetap dan tunjangan aparat diperuntukkan bagi pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan aparatnya yang termasuk aparat adalah sekretaris desa satu orang, kepala seksi tiga orang yang terdiri dari seksi pelayanan, seksi pemerintaha dan Kaur kesejakteraan, dan adalagi dibawahnya sekretaris namanya kepala urusan perencanaan dan Kaur Keuangan. Selain itu ada 4 orang sebagai kepala dusun, Kepala wilayah, jadi jumlah personil yang termasuk pemerintahan di Desa Batu Ke'de sebanyak 11 orang. Keseblas inilah yang dibayar atau memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, adapun nominalnya sebesar yang tertera di tabel (APBDes 2016).”

Wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de yang menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan operasi perkantoran adalah semua kebutuhan yang di perlukan dikantor terkait dengan pelayanan ATK dan sarana kantor lainnya yang dibutuhkan.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan operasi perkantoran merupakan bentuk pelaksanaan yang diperuntukkan bagi pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan aparatnya yang termasuk aparat adalah dekretaris desa satu orang, kepala seksi tiga orang yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan umum, dan adalagi dibawahnya sekretaris namanya kepala urusan pembangunan. Selain itu ada empat orang sebagai kepala dusun, Kepala wilayah, jadi jumlah personil yang termasuk pemerintahan di Desa Batu Ke'de sebanyak 11 orang. Keseblas inilah yang dibayar atau memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh Kepla Desa. Pelaksana kegiatan diketahui oleh kepala desa penerimaan barang dilakukan pembayaran melalui pemegang kas dengan menggunakan kode rekening dan setiap jenis barang harus dibuatkan nota penerimaan .”

Operasional pelaksanaan BPD, biaya yang dikeluarkan oleh BPD apabila melaksanakan kegiatan rapat termasuk ATK dan snack. Bentuk pengadaan sarana dan prasarana kantor nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh Kepala Desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun

Kira menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan musrenbang biasanya diawali dengan pelaksanaan musyawarah dusun untuk mengusulkan bidang/kegiatan apa yang paling mendesak atau menjadi skala prioritas di Dusunnya dengan catatan tidak boleh keluar dari pada RPJMD. Hasil musyawarah dusun di musyawarahkan di tingkat Desa yang menjadi skala prioritas diantara empat bidang untuk dijadikan dalam penyusunan RKPD Desa dan APBDes.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan musrenbang biasanya diawali dengan pelaksanaan musyawarah dusun untuk mengusulkan bidang/kegiatan apa yang paling mendesak atau menjadi skala prioritas di Dusunnya dengan catatan tidak boleh keluar dari pada RPJMD. Hasil musyawarah dusun di musyawarahkan di tingkat Desa yang menjadi skala prioritas diantara empat bidang untuk dijadikan dalam penyusunan RKPD Desa dan APBDes.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang menerima setiap penghasilan tetap adalah kepala Desa satu orang, sekretaris non PNS 1 orang, kepala seksi tiga orang, dua kepala urusan dan empat orang kepala Dusun.”

Penerima penghasilan tetap di Desa Batu Ke'de adalah kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi tiga orang, kepala urusan, dan empat orang kepala dusun.

Pada operasional perkantoran dikepalai oleh kepala desa, kemudian sekretaris yang bertugas untuk melakukan verifikasi, bendahara selaku pelaksana kegiatan dan kasi pemerintahan. Yang terlibat dalam operasional BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris BPD, ditambah

delapan orang. Jumlah keseluruhan adalah 11 orang yang resmi dilantik menjadi pengurus dan anggota BPD.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor (pelaksana kegiatan) adalah kasi pemerintahan.”

Dalam operasional BPD yang terlibat adalah ketua, wakil ketua, sekretaris BPD, dan delapan orang lainnya. Jadi, jumlah orang yang dilantik untuk menjadi pengurus dan anggota BPD adalah 11 orang. Kemudian mengenai pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah kasi pemerintahan. Yang terlibat dalam musrenbang adalah perwakilan dari masyarakat BPD, aparat pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, BUMNDes dan lembaga-lembaganya yang ada di desa, PKK, kelompok tani dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBDes.

Pada musrenbang yang dilaksanakan di Desa Batu Ke'de melibatkan perwakilan dari masyarakat BPD, aparat pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, BUMNDes dan lembaga-lembaganya yang ada di desa, PKK, kelompok tani dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBDes

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Utamanya dilakukan dalam operasional perkantoran, pengadaan ATK, Komputer laptop, meja kerja, serta alat-alat lain yang berhubungan dengan pelayanan.”

Upaya yang dilakukan dalam operasional perkantoran yaitu pengadaan ATK, Komputer laptop, meja kerja, serta alat-alat lain yang berhubungan dengan pelayanan.

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Utamanya yang dilakukan oleh BPD melakukan rapat, koordinasi antara anggota, pengurus untuk membahas bilamana ada yang mendasar untuk di koordinasikan.”

Upaya yang dilakukan dalam operasional BPD yaitu melakukan rapat, koordinasi antara anggota, pengurus untuk membahas apabila ada hal yang mendasar untuk di koordinasikan.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Utama yang dilakukan dalam sarana dan prasarana kantor pelaksana kegiatan menyusun barang sesuai yang ada di APBD.dan selambat-lambatnya diterima tiga hari setelah pelaksanaan barang jadi dan setelah di terimah di buatkan lagi nota penerimaan barang yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan lalu di bayar oleh pemegang kas.(bendahara desa).”

Mengenai sarana dan prasarana kantor, upaya yang akan dilakukan adalah pelaksana kegiatan menyusun barang sesuai yang ada di APBD.dan selambat-lambatnya diterima tiga hari setelah pelaksanaan barang jadi dan setelah di terima kemudian membuat nota penerimaan barang yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan, lalu di bayar oleh pemegang kas.(bendahara desa)

Hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan dalam musrenbang desa adalah perencanaan RPJM ditempat bidang: lalu dilimpahkan bidang,

kemudian setiap bidang dikelompokkan dalam kegiatan dan kegiatan ini dicermati secara cermat untuk memahami atau memprioritaskan kegiatan yang sangat dibutuhkan lalu dijadikan untuk menyusun RKPD untuk satu tahun, kemudian disusun APBDesa setelah pagu indikatif telah ditetapkan dari kecepatan/kata.”

Upaya yang dilakukan dalam musrenbang desa dan penyusunan RKPDes dan APBDes adalah perencanaan RPJM ditempat bidang: lalu dilimpahkan bidang, kemudian setiap bidang dikelompokkan dalam kegiatan dan kegiatan ini dicermati secara cermat untuk memahami atau memprioritaskan kegiatan yang sangat dibutuhkan lalu dijadikan untuk menyusun RKPD untuk satu tahun, kemudian disusun APBDesa setelah pagu indikatif telah ditetapkan dari kecepatan/kata.

2. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa adalah Kebijakan Pemerintah untuk untuk merubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan. Bentuk pelaksanaan kebutuhan dasar dilaksanakan pembangunan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan, posyandu ditingkat dusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan pembangunan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan, posyandu ditingkat dusun. Pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan diantaranya

Pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani.

Wawancara dengan Kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dasar kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Perencana pelaksanaan kegiatan.”

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Perencana pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Kaur perencanaan, verifikasi sekdes, diketahui kades persetujuan pembangunan.”

Yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan Desa yaitu Kaur perencanaan, verifikasi sekdes, diketahui kades persetujuan pembangunan.

Warga masyarakat Desa Batu Ke'de sangat menerima pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat karena hasil bumi yang dipanen sudah tidak terlalu banyak (casnya) hingga yang dikeluarkan.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan sebelum ada pembanguna tersebut, kolom-kolom rumah masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas kebutuhan dasar.”

Pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Batu Ke'de Sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat,

bahkan sebelum ada pembangunan tersebut, kolom-kolom rumah masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas kebutuhan dasar.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Dapat: karena biaya produksi pertanian dan biaya panen dapat ditekan dan pendapatan masyarakat petani meningkat sekaligus mensejahterahkan masyarakat pada umumnya.”

Pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena biaya produksi pertanian dan biaya panen dapat ditekan dan pendapatan masyarakat petani meningkat sekaligus mensejahterahkan masyarakat pada umumnya.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan kemasyarakatan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik atau dengan defenisi lain suatu usaha untuk pembinaan kepribadian dan mandiri. Pelaksanaan dan fasilitas LKMD, mengadakan rapat membalas, keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa.

Bentuk pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas LKSMD yaitu mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa. Bentuk pelaksanaan pembinaan PKK antara lain: mengadakan rapat rutin TP PKK tingkat desa diadakan selama lima kali setahun, untuk membahas keterkaitan dengan anggaran APBDes beserta dengan pelaksanaannya. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Pengurus PKK).

Bentuk pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas PKK yaitu mengadakan rapat rutin TP PKK tingkat desa diadakan selama lima kali setahun, untuk membahas keterkaitan dengan anggaran APBDes beserta dengan pelaksanaannya. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Pengurus PKK).

Bentuk pelaksanaan pembinaan pemuda mengadakan turnamen sepakbola tingkat Desa, dan pengadaan baju seragam, sepatu beserta atribut lainnya.

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Dibayarkan honorium kepada kader posyandu, Pengadaan baju seragam kader posyandu, pengadaan meja dan kursi posyandu.”

Bentuk pelaksanaan pembinaan kader Poyandu seperti membayar honorium kepada kader posyandu, Pengadaan baju seragam kader posyandu, pengadaan meja dan kursi posyandu.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan LKSMD yaitu ketua, sekretaris, bendahara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas LKSMD yaitu ketua, sekretaris, bendahara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Lebih lanjut wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan kegiatan PKK yaitu pengurus dan anggota PKK se-desa Batu Ke'de, Tokoh

Agama, Tokoh Pemuda, Aparat pemerintah Desa, Pengurus dan anggota BPD.”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas PKK yaitu pengurus dan anggota PKK se-desa Batu Ke'de, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Aparat pemerintah Desa, Pengurus dan anggota BPD.

Selanjutnya wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pembinaan pemuda yaitu Karang taruna, Tokoh pemuda, Hansip, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, Klub-klub sepakbola.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pembinaan pemuda yaitu Karang taruna, Tokoh pemuda, Hansip, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, Klub-klub sepakbola.

Lebih lanjut wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam fasilitas hansip adalah anggota hansip sendiri dengan Pembina desa.”

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam fasilitas hansip adalah anggota hansip sendiri dengan Pembina Desa Batu Ke'de.

Kemudian hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pembinaan kader posyandu adalah semua pengurus dan anggota posyandu se-Desa Batu Ke'de.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pembinaan fasilitas kader posyandu adalah semua pengurus dan anggota posyandu se-Desa Batu Ke'de.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa dilakukan diluar daerah (provinsi) dengan mengikutsertakan dua peserta yaitu dari aparat desa yang dilaksanakan selama tiga hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa bentuk pelatihan kades dan aparat tidak jauh beda dengan pelatihan sistem aplikasi keuangan Desa, hanya saja waktu, tempat dan materinya berbeda dan otomatis fasilitator pasti berbeda. Begitu juga dengan aparat desa, materi sama namun yang membedakan adalah tidak bersamaan kepada desa dan staf ataupun sekretaris.

Wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari di Hotel.”

Lebih lanjut Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Bentuk pelatihan KPMD adalah dilaksanakan diluar daerah selama tiga hari.”

Sejalan dengan bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa, bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa dan bentuk pelatihan KPMD juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari di Hotel.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Batu Ke'de menyatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelatihan sistem aplikasi desa adalah kaur perencanaan dan kaur keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam pelatihan sistem aplikasi desa adalah kaur perencanaan dan kaur keuangan.

Yang terlibat dalam peningkatan kapasitas dan manajemen sistem pemerintahan desa yaitu Kepala desa satu orang, sekretaris satu orang dan kaur pemerintahan satu orang.

Wawancara dengan Syahril selaku Kepala Dusun Kira menyatakan bahwa:

“Tokoh pemuda yang memahami, dan mengoperasikan computer.”

Yang terlibat dalam pelatihan KPMD pemeberdayaan teknis yaitu tokoh pemuda yang memahami dan mampu mengoperasikan computer.

BAB V

PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pembangunan desa adalah suatu Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau masyarakat desa yang meliputi: Pembangunan desa yang berskala lokal dan Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan program pembangunan tersebut meliputi empat bidang di antaranya: Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah segala aktivitas, tugas fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga desa yang punya kewenangan dalam mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan Desa.

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan adalah Jumlah pendapatan yang diterima oleh aparat Desa dalam kurun waktu satu tahun begitu juga dengan tunjangan, namun yang memperoleh tunjangan hanya Kepala Desa dan sekretaris Desa non PNS. Bentuk pelaksanaan penghasilan tetap dan tunjangan aparat diperuntukkan bagi pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan aparatnya yang termasuk aparat adalah sekretaris desa satu orang, kepala seksi tiga orang yang terdiri dari seksi Pelayanan, seksi Pemerintahan, dan Seksi kesejahteraan adalagi dibawahnya sekretaris namanya Kaur Perencanaan dan Kaur keuangan . Selain itu ada empat⁴ orang sebagai kepala dusun, atau kepala wilayah, jadi jumlah personil yang termasuk pemerintahan di Desa Batu Ke'de sebanyak 11

orang. Keseblasan inilah yang dibayar atau memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, adapun nominalnya sebesar yang tertera di tabel (APBDes 2016).

- b. Operasional Perkantoran adalah segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di kantor baik yang berhubungan dengan anggaran maupun dalam pelayanan rutinitas di kantor yang dilakukan oleh pemerintah Desa, termasuk ATK dan sarana lainnya yang dibutuhkan. Bentuk pelaksanaan operasi perkantoran merupakan bentuk pelaksanaan yang diperuntukkan bagi pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan aparatnya yang termasuk aparat adalah sekretaris desa satu orang, kepala seksi tiga orang yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan umum, dan adalagi dibawahnya sekretaris namanya kepala urusan pembangunan. Selain itu ada empat orang sebagai kepala dusun, atau kepala wilayah, jadi jumlah personil yang termasuk pemerintahan di Desa Batu Ke'de sebanyak 11 orang semuanya. Keseblasan inilah yang dibayar atau memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh Kepala Desa, penerimaan barang dilakukan pembayaran melalui pemegang kas dengan menggunakan kode rekening dan setiap jenis barang harus dibuatkan nota pesanan.
- c. Operasional BPD adalah Kegiatan yang dilakukan oleh BPD, dan tidak termasuk dari kegiatan pemerintah desa, karena BPD adalah lembaga mitra pemerintah desa untuk bersama didalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan mitra dari pemerintah Desa menjalankan roda

pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayah Desa tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh BPD apabila melaksanakan kegiatan rapat termasuk ATK dan snack. Bentuk pengadaan sarana dan prasarana kantor nota pesanan dibuat oleh pelaksana kegiatan diketahui oleh Kepala Desa. Pelaksanaan musrenbang biasanya diawali dengan pelaksanaan musyawarah dusun untuk mengusulkan bidang/kegiatan apa yang paling mendesak atau menjadi skala prioritas di Dusunnya dengan catatan tidak boleh keluar dari pada RPJMD. Hasil musyawarah dusun di musyawarahkan di tingkat Desa yang menjadi skala prioritas diantara empat bidang untuk dijadikan dalam penyusunan RKPD Desa dan APBDes.

- d. Kegiatan sarana dan prasarana Kantor Desa adalah semua kegiatan yang keterkaitan dengan sarana atau alat yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program pembangunan
- e. Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPDDes dan APBDesa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa jangka waktu satu tahun, karena RKPDDesa juga merupakan penjabaran dari RPJMDesa satu periode Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah jumlah pendapatan desa yang diperoleh dari perimbangan pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten, yang disebut dana ADD dan Pendapatan dana transfer dari Pusat melalui rekening Pemerintah kabupaten dan dilanjutkan ke rekening Desa, Sedangkan belanja Desa adalah belanja yang mencakup empat bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan. Pada musrenbang yang

dilaksanakan di Desa Batu Ke'de melibatkan perwakilan darimasyarakat (BPD), aparat pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, BUMNDes dan lembaga-lembaganya yang ada di desa, PKK, Kelompok Tani dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBDes.

- f. Musyawarah dan Penyusunan LKPJ adalah musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa satu orang sekretaris satu orang Kasi tiga orang, dan dua kepala bagian serta empat orang kepala Dusun Yang melaksanakan musyawarah keterkaitan dengan penyusunan LKPJ/LPPD Desa. LKPJ adalah laporan keuangan pertanggungjawaban Desa yang disusun setelah pencairan dan pelaksanaan tahap yang bersangkutan, dalam satu tahun pencairan dilaksanakan dua kali tahap setahun. Begitu juga dengan LPPD adalah Laporan Pembangunan Pemerintah Desa yang dilaksanakan sama dengan LKPJ. .

2. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa adalah Kebijakan Pemerintah untuk untuk merubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan. Bentuk pelaksanaan kebutuhan dasar dilaksanakan pembangunan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan, posyandu ditingkat dusun.

- a. Kegiatan Pemenuhan kebutuhan Dasar adalah kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dimana masyarakat sangat membutuhkan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terbagi dua:

- a) Pembangunan posyandu satu paket adalah kegiatan yang merupakan kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat sangat membutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat setempat. terutama kesehatan bagi balita, lanjut usia dan orang tua, dilakukan pemeriksaan .setiap bulan oleh para kader-kader posandu di masing-masing Dusun.
 - b) Pengadaan alat peraga TK/KB (PAUD) adalah sala satu alat atau mainan anak usia dini sekaligus menjadi pendidikan untuk mereka.
- b. Bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan diantaranya Pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani. Misalnya:
- a) Pengecoran Jln Dusun Kira
 - b) Rabat Beton Jln Tani Parandean –Lumika
 - c) Perintisan To’Koa –Pasang
 - d) Perkerasan Jln Tani Dusun –Kaban
 - e) Perkerasana Jln Tani –Balombong- To’ Salu
 - f) Pengecoran Jln Setapak—Lo’ko Lumbang
 - g) Pengecortan Jlan Setapak Talakaju
 - h) Pembangunan Dekker Jln Kurin-Kurin
 - i) Pembanguna Dekker dan Talut Jln Kampung Baru

Kegiatan pemenuhan sarana dan prasaran desa adalah kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap inkaperkavita masyarakat, karena mayoritas masyarakat adalah hidup dari pertanian. Pelaksanaan program pembangunan sarana dan

prasarana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena biaya produksi pertanian dan biaya panen dapat ditekan dan pendapatan masyarakat petani meningkat sekaligus mensejahterahkan masyarakat pada umumnya.

3 .Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan kemasyarakatan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik atau dengan defenisi lain suatu usaha untuk pembinaan kepribadian dan mandiri:

- a. Pembinaan dan fasilitas LKSMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selalu diadakan pembinaan agar mampu mandiri dan berhasil guna dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat, pelaksanaan dan fasilitas LKMD, bentuk pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitas LKSMD yaitu mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa.
- b. Pembinaan dan fasilitas PKK adalah Lembaga ini yang mayoritas anggotanya adalah kaum perempuan dan dilakukan pembinaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa pada umumnya. bentuk pelaksanaan pembinaan PKK antara lain: mengadakan rapat rutin TP PKK tingkat desa diadakan selama lima kali setahun, untuk membahas keterkaitan dengan anggaran APBDes beserta dengan pelaksanaannya. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Pengurus PKK).

- c. Bentuk pelaksanaan pembinaan pemuda mengadakan turnamen sepakbola tingkat Desa, dan pengadaan baju seragam, sepatu beserta atribut lainnya. Bentuk pelaksanaan pembinaan kader Poyandu seperti membayar honorium kepada kader posyandu, Pengadaan baju seragam kader posyandu, pengadaan meja dan kursi posyandu.
- d. Pembinaan dan fasilitas hansip adalah Pembinaan yang dilakukan sebagai penanggungjawab dan keamanan dalam masyarakat. Mengenai fasilitas hansip yang terlibat didalamnya adalah anggota hansip sendiri dengan Pembina Desa Batu Ke'de.
- e. Pembinaan kader posyandu adalah semua pengurus dan anggota posyandu se-Desa Batu Ke'de. Selanjutnya yang terlibat dalam pembinaan fasilitas kader posyandu adalah semua pengurus dan anggota posyandu se-Desa Batu Ke'de.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan adalah Sebagai upaya untuk membangun potensi guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang. Pemberdayaan juga dapat didefinisikan memberikan pengetahuan seseorang atau sekelompok untuk lebih bertanggungjawab terhadap mereka yang dikerjakan dalam meningkatkan efisiensi dan membuat individu memeberikan sumbanganyang lebih besar, terkhususs aparat pemerintahan Desa.

- a. Pelatihan sistem aplikasi Desa adalah pelatihan yang diperuntukan untuk aparat yang telah ditunjuk oleh Kepala desa untuk menyusun laporan secara on line bukan lagi manual. Bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa dilakukan diluar daerah

(provinsi) dengan mengikutsertakan dua peserta yaitu dari aparat desa yang dilaksanakan selama tiga hari.

- b. Pelatihan Kades dan Aparat Desa adalah pelatihan tentang manajemen dan pengelolaan pemerintahan Desa mulai dari penyusunan RPJMDesa RKPDesa, APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban desa. Bentuk pelatihan kades dan aparat tidak jauh beda dengan pelatihan sistem aplikasi keuangan Desa, hanya saja waktu, tempat dan materinya berbeda dan otomatis fasilitator pasti berbeda. Begitu juga dengan aparat desa, materi sama namun yang membedakan adalah tidak bersamaan kepada desa dan staf ataupun sekretaris.
- c. Peningkatan Kapasitas dan manajemen Pemerintahan Desa adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas di dalam memanejemen pemerintahan Desa. Bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari di Hotel. Sejalan dengan bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa, bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintah desa.
- d. Pelatihan KPMD juga dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah melibatkan semua aparat pemerintahan Desa ,namun aparat belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan karena sumber daya yang dimilikinya masih perlu untuk peningkatan terutama pemberdayaan aparat pemerintah Desa. Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Batu Ke'de melibatkan perwakilan dari masyarakat(BPD), aparat pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, BUMNDes dan lembaga-lembaganya yang ada di desa, PKK, kelompok tani dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBDes.
2. Pada Bidang Pembangunan Desa, Desa Batu Ke'de telah melakukan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di putuskan dalam musrenbang, Namun hasil musrenbang belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan Karen masih didominasi oleh pembangunan fisik sementara pembangunan sumber daya manusia seolah kurang diperhatikan
 - a. Pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Batu Ke'de sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, bahkan

sebelum ada pembangunan tersebut, kolom-kolom rumah masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas kebutuhan dasar.atau pos pelayanan kesehatan

- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa Seperti pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan tani, pengerasan dan pengecoran jalan Desa dan jalan tani.
3. Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, mulai dari pembinaan fasilitas LKSMD, pembinaan fasilitas PKK, pembinaan pemuda, pembinaan fasilitas hansip, sampai pembinaan kader Poyandu dilakukan dengan mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya sarana dan prasarana Desa untuk kemajuan Desa Batu Ke'de.
4. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas di dalam manajemen pemerintahan Desa. Termasuk melakukan pelatihan sistem aplikasi keuangan desa, pelatihan kades dan aparat, pelatihan kapasitas, manajemen sistem pemerintah desa dan bentuk pelatihan KPMD dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari.

B. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak pemerintah Desa agar lebih mengikutsertakan aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya sekedar obyek tetapi betul-betul sebagai, pelaksana kegiatan, subyek dalam pelaksanaan

program pembangunan khususnya di bidang penyelenggaraan Pemerintah desa

2. Sebaiknya Dana Desa bukan hanya semata diperuntukan untuk pembangunan fisik semata , tetapi juga tidak kala pentingnya pembangunan sumber daya manusianya. Karena apala artinya membangun fisik sementara manusia tidak berkualitas dan konpetitif dalam menghadapi. perubahan yang begitu cepat .
3. Pemerintah harus proaktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat khususya terhadap lembaga yang ada di desa terkait dengan pelaksanaan program Pembangunan. Dan diharapkan menjadi lembaga yang berkualitas sebagai mitra pemerintahan Desa, akan pentingnya pengawasan agar masyarakat dapat lebih berperan dalam mengawasi dan bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan, agar mengurangi tingkat kesalahan dalam suatu pengerjaan pembangunan.
4. Bidang pemberdayaan melihat dari data yang ada ternyata anggaran yang diperuntuhkan untuk pemberdayaan khsusnya aparat pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan mengingat sumber daya manusia di tingkat Desa masih perlu untuk peningkatan, karena tulang pembangunan ada di desa Kalau Desa maju daerah akan maju dan secara otomatis Negara dan makmur, maka terwujudlah tujuan Negara .

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan daerah partisipatif*, pondok edukasi. Solo
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Basri dan Subri. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Cohen, JM, dan N.T. Uphoff. 1990. *Rural Development Participation*, Cornell University RDCCIS: New York.
- Iskandar Mirsa. 1998. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan suatu studi di Desa Cibeusi dan Desa Sayang Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang*. Jurnal Publikasi.
- Kansil, C.S.T. 1991. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, PT Gramedia Utama, Jakarta.
- Kuncoro, Mudradjad. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Derah*, Jakarta: Erlangga
- Kunarjo. 2002. *Perencana dan Pengendalian program Pembangunan*, enerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Mansur. 2002. *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, 1995, *Pembangunan untuk Rakyat: Memaduka pertumbuhan dan pemetaan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1994. *Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri*, IIP: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Jakarta: Erlangga
- Siagian, S.P. 1994. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional* Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, S.P. 2008. *Administrasi pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta

- Sumaryadi, Nyoman, I. 2000. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Cita Utama, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2012. *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Todaro, Michael. P. 1977. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Buku I*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro Michael P. 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Buku 3*, Diterjemahkan oleh Harris Munandar. Erlangga. Jakarta.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wojowasito W.J.S. Poerwadarminto. 2007. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SUMBER UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

- A. 1. Identitas tempat : Desa Batu Ke'de
2. Alamat : Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle,
Kabupaten Enrekang
3. Waktu pengambilan dokumen: 15 Nopember 2017 – 15 Desember 2017
- B. Struktur organisasi Desa Batu Ke'de.
- C. Dokumen RKPDesa Batu Ke'de Tahun Anggaran 2016 yang meliputiempat bidang
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan fisik
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa
- D. Dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran Pembangunan . infrastruktur desa:
 1. Dokumen/ arsip yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Batu Ke'de.
 2. Dokumen/foto-foto pembangunan di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle.

PEDOMAN WAWANCARA

A .IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Waktu wawancara :

B. TANGGAPAN INFORMAN

1. Pertanyakan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan pemerintahan

- a. Bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Batu Ke'de ?
- b. Siapa sajakah yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan program pembangunan di Desa Batu Ke'de dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pendekatan terhadap masyarakat Desa Batu Ke'de untuk mendukung program pelaksanaan pembangunan di desa ini?

2. Pertanyaan yang berhubungan dengan Pembangunan

- a. Bagaimana cara pengkajian yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program Pembangunan di desa Batu Ke'de?
- b. Apakah warga masyarakat Desa Batu Ke'de menerima baik kehadiran program pelaksanaan pembangunan ?
- c. Kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam Pelaksanaan program pembangunan di Desa Batu Ke'de ?
- d. Apa Program Pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Ke'de?

3. Pertanyaan yang berhubungan dengan Pembinaan

1.

1.

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Waktu wawancara :

B. TANGGAPAN INFORMAN

Pertanyakan yang berhubungan dengan Bidang penyelenggaraan pemerintahan

1. Bagaimana bentuk Pelaksanaan Penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintah Desa?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari pada operasional perkantoran?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan operasional BPD?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan musrembang Desa dan penyusunan RKPDesa dan APBDesa?
6. Siapa saja yang terlibat atau menerima penghasilan tetap dan tunjangan?
7. Siapa saja yang terlibat dalam operasional perkantoran?
8. Siapa saja yang terlibat dalam operasional BPD?
9. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor?
10. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan musrembang dan penyusunan RKPDesa dan APBDesa

11. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam operasional perkantoran?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam operasional BPD?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam sarana dan prasarana kantor?
14. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam Musrebang desa dan penyusunan RKPDes dan APBDes
15. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyusunan LKPJ/LPPD dan JPPDes?

Pertanyaan yang mengenai bidang pembangunan desa

16. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar?
17. Bagaimana bentuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa?
18. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar ?
19. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa?
20. Apakah warga masyarakat Desa Batu Ke'de menerima pelaksanaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar?
21. Apakah warga masyarakat Desa Batu Ke'de menerima pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaran desa?
22. Apakah pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar dimamafatkan dengan sebaik-baiknya?
23. Apakah pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana? pembangunan desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Pertanyaan yang berhubungan dengan bidang Pembinaan

24. Bagaimana bentuk pelaksanaan dan pembinaan dan fasilitas LKSMD?

- 25 Bagaimana bentuk pelaksanaan dan pembinaan dan fasilitas PKK?
- 26 Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan pemuda?
- 27 Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan dan fasilitas hansip?
- 28 Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan kader Poyandu?
- 29 Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan dan fasilitas LKSMD ?
- 30 Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dan pembinaan dan fasilitas PKK ?
- 31 Siapa saja yang terlibat pembinaan pemuda?
- 32 Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan fasilitas Hansip?
- 33 Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan fasilitas kader posyandu?

Pertanyaan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan

- 34 Bagaimana bentuk pelatihan sistem aplikasi keuangan desa?
- 35 Bagaimana bentuk pelatihan kades dan aparat desa?
- 36 Bagaimana bentuk pelatihan kapasitas dan manajemen sistem pemerintahan desa?
- 37 Bagaimana bentuk pelatihan KPMD Pemberdayaan teknis ?
- 38 Siapa saja yang terlibat dalam sistem aplikasi keuangan?
- 39 Siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kapasitas dan manajemen sistem pemerintahan desa?
- 40 Siapa saja yang terlibat dalam pelatihan KPMD pemberdayaan teknis ?

PEDOMAN OBSERVASI

A. IDENTITAS TEMPAT OBSERVASI

1. Nama tempat : Kantor Desa Batu Ke'de
2. Alamat : Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle
3. Waktu Observasi : Tanggal 15 Oktober 2017 – 15 November 2017

B. HAL-HAL YANG DI OBSERVASI

1. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Pelaksanaan program pembangunan di desa
2. Program-program pelaksanaan pembangunan desa.
3. Kesimpulan observer.

Daftar Singkatan

ADD

Alokasi Dana Desa

APBDes

Anggaran Pendapatan Desa

APBN ;.....

Anggaran Pendapatan Belanja Negara

BAPENAS ;.....

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPD ;.....

Badan Permusyawaratan Desa

BUMDES ;.....

Badan Usaha Milik Desa

DD ;.....

Dana Desa

GBHN ;

Garis –Garis Besar Haluan Negara

IPTEK ;

ilmu Pengetahuan dan Teknologi

KADES ;.....

Kepala Desa

KADUS;
.Kepala Dusun

KASI ;
Kepala Seksi

KAUR;.....
Kepala Urusan

LKPJ;.....
Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban

LKSMD;
Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa

LPMD;.....
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

LPPD;.....
Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa

MUSREMBANG;.....
Musyawarah Perencanaan Pembangunan

PKK;.....
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

RKPDes;.....
Rencana Kerja Pembangunan Desa

RKPJMDes;.....

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa

RPJMDes ;.....

Rencana Pembangunan Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lasri
Tempat Dan Tanggal Lahir : To' Cemba, 01 Nopember 1970
Alamat : Parandean, Desa Batu Ke'de
Nama Instansi : Kantor Desa
Alamat Instansi : Desa Batu Ke'de
Riwayat Pendidikan :

1. SD 93 Batu Ke'de
2. SMP Baroko
3. STM Kosgoro Parepare

Riwayat Pekerjaan :

1. Tenaga Sukarelah Sekretaris Desa (2002)
2. PNS Sekretaris Desa 2009
3. PNS Sekretaris Desa 2017

Pangkat Golongan : Pengatur Muda II b